Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia

# Diplomasi

TABLOID

NO. 116
TAHUN XIII
TGL. 15 SEPTEMBER 2021

www. Kemlu.go.id tabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemlu

Direktorat Diplomasi Publik
Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110
Telepon : 021-3813480
Faksimili : 021-3858035

MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI

# Tantangan Diplomasi
## Memperebutkan Pasokan Vaksin

**Menlu RI Dorong**
Diversifikasi Produksi Vaksin ke Negara Berkembang Terkait COVID 19

**Langkah Jitu**
Diplomasi Multilateral Indonesia Dukung Palestina

# SURAT PEMBACA

## KETANGGUHAN KINERJA DIPLOMASI DI TENGAH PANDEMI

Saya mengapresiasi kinerja mesin diplomasi Indonesia yang tetap prima di tengah tantangan pandemi COVID-19. Mesin diplomasi Indonesia berlari kencang dan terus bekerja. Para diplomat terlibat aktif dan berada di garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan peralatan kesehatan dan pengadaan vaksin serta pemulihan ekonomi. Dalam memperingati HUT ke-75 Kemlu, Retno menyampaikan para diplomat terus beradaptasi dengan tantangan global saat ini untuk berkontribusi bagi Tanah Air. Mereka berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi Indonesia, melindungi, membantu dan memfasilitasi kepulangan WNI yang terdampak di luar negeri.

Tantangan pandemi menunjukkan ketangguhan mesin diplomasi perlindungan Indonesia. Para diplomat tidak ada yang absen. Seluruh staf perwakilan di luar negeri bertaruh nyawa masuk zona merah, membuka akses transportasi untuk menyelamatkan WNI kita di luar negeri.

Terdapat sejumlah misi penting perlindungan yang berhasil dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri pada masa pandemi COVID-19, yaitu terdistribusikannya lebih dari 500.000 paket bantuan untuk WNI di seluruh dunia; fasilitasi pemulangan 26.791 ABK Indonesia ke Indonesia; serta pemulangan 1.114 orang WNI anggota Jamaah Tabligh dari 13 negara ke Indonesia.

Menghadapi pandemi yang melanda seluruh dunia, kompleksitas tantangan yang ditimbulkan oleh pembatasan pergerakan dan resiko kesehatan dan keselamatan, tidak menyurutkan usaha seluruh elemen diplomasi Indonesia, baik di pusat maupun di Perwakilan untuk tetap hadir melindungi.[]

Aisyah Zaeni, Solo.

# CATATAN REDAKSI

Pembaca Tabloid Diplomasi yang budiman,

Tabloid Diplomasi Edisi September 2021 kali ini mengupas tema utama Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Krisis Global dan mengangkat isu terkini mengenai diplomasi vaksin.

Pada awal tahun 2021, dunia memiliki harapan baru bahwa pandemi COVID-19 akan lebih cepat terselesaikan. Harapan tersebut muncul karena mulai tersedianya vaksin pada awal tahun dan angka kasus baru di hampir seluruh negara menunjukkan penurunan. Hal tersebut memberikan harapan baru jika keadaan tersebut bisa terus dijaga, maka dunia akan lebih cepat keluar dari pandemi COVID-19. Sampai saat ini vaksin yang diberikan sudah mencapai 1 Miliar dengan rata-rata kecepatan vaksinasi 19,7 juta dosis per hari. Dari program vaksin yang diberikan maka ini merupakan program vaksinasi global terbesar sepanjang sejarah.

Namun, harapan dan dugaan bahwa pandemi COVID-19 akan dapat lebih cepat berakhir ternyata belum dapat terwujudkan. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus baru saja mengeluarkan pernyataan bahwa jumlah infeksi global terus meningkat selama 9 minggu terakhir. Gelombang baru penyebaran virus terjadi di banyak negara. Dengan adanya kenaikan kasus baru di beberapa negara dan dengan munculnya beberapa varian baru yang lebih infeksius, menyebabkan negara-negara pengekspor vaksin mengambil tindakan restriktif di antaranya termasuk restriktif untuk ekspor vaksin dan obat-obatan yang sangat diperlukan di berbagai negara lainnya. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan masuknya vaksin ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

Tetapi Indonesia patut bersyukur karena telah bergerak mencari vaksin mulai dari awal pandemi COVID-19. Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN, dan Kementerian Kesehatan untuk membuka akses, mencari vaksin bagi kebutuhan dalam negeri.

Indonesia berusaha untuk mencari vaksin bagi kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga terus ikut berjuang mengenai kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Salah satu kontribusinya adalah Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi bersama dengan Menteri Kesehatan Ethiopia Lia Tadesse dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada Karina Gould menjadi Co-Chair COVAX AMC Engagement Gorup (AMC EG). COVAX AMC EG merupakan forum negara AMC dengan negara-negara donor untuk pengadaan dan distribusi vaksin bagi negara AMC. Di sinilah kita melihat bahwa multilateralisme memiliki manfaat.

Diplomasi kesehatan, yakni diplomasi vaksin, harus menjadi dan telah menjadi salah satu bagian prioritas diplomasi Indonesia saat ini. “Diplomasi kesehatan,akan terus menjadi isu penting dalam pelaksanaan hubungan luar negeri dan upaya membangun ketahanan kesehatan, mulai dari ketahanan kesehatan nasional, regional, dan dunia akan terus bergulir dan semakin menebal.”

Dengan pandemi COVID-19 pola hubungan antarbangsa akan berubah, isu kesehatan akan menjadi salah satu prioritas. Bagi Indonesia yang paling penting adalah membangun ketahanan kesehatan nasional. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui pembangunan kemandirian industri obat-obatan dan bahan baku obat. Sebagai negara besar, Indonesia tidak boleh terus tergantung sepenuhnya pada pasokan asing. Diplomasi juga berkomitmen untuk berkontribusi mendukung upaya pemerintah membangun kemandirian dibidang kesehatan.

Selain mengangkat tema diplomasi vaksin, edisi kali ini juga mengupas khusus tentang dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Topik-topik lain seperti Forum regional ASEAN dan lainnya juga akan dikupas pada kesempatan kali ini. Selamat membaca.[]

# DAFTAR ISI


**FOKUS UTAMA**

04 Buah Diplomasi Multilateral Mengamankan Suplai Vaksin
05 Tantangan Diplomasi Memperebutkan Pasokan Vaksin
06 Prioritas Diplomasi RI Menjaga Ketahanan Kesehatan Nasional
07 Pimpin Pertemuan COVAX Menlu Dorong Percepatan Distribusi Vaksin Global

**FOKUS**

08 Menlu RI Dorong Diversifikasi Produksi Vaksin ke Negara Berkembang Terkait COVID 19
09 Melawat Ke AS dalam Penanganan COVID-19 Menlu RI Berhasi Mendapat Tambahan Dukungan Vaksin Dose Sharing AS Sebanyak 3.5 juta Dosis
10 Kemitraan Strategis RI-AS Indonesia dan AS Perkuat Kerja Sama Atasi Pandemi dan Stabilitas Kawasan
11 Pertemuan ke-2 Sherpa G20: Indonesia Dorong Implementasi Konkret Kesepakatan G20

**LENSA**

12 Singapura Kirim Bantuan Penanganan COVID-19 kepada Indonesia
12 Dukungan Vaksin, Oksigen, dan Alkes dari PEA dan Singapura Tiba di Jakarta
13 Langkah Jitu Diplomasi Multilateral Indonesia Dukung Palestina
14 Menlu RI Serukan Dukungan terhadap Perjuangan Palestina di KTM GNB
15 Sejarah Panjang Konflik Israel – Palestina dan Komitmen Dukungan Indonesia
16 Aktivis Kemanusian : Indonesia Berperan Aktif dan Konsisten Mendukung Palestina
17 Indonesia Tegaskan Kembali Komitmen Dukungan kepada Kemerdekaan Palestina pada Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB
18 Apa Kata NU dan Muhammadiyah
19 Peran Diplomasi Indonesia: Dalam Konflik Israel-Palestina

**SOROT**

20 Stand For Palestine: Isu Agama Atau Kemanusiaan?
21 Demi Kemanusiaan : Kami, Indonesia Bersama Palestina
22 Titik Kritis dan Detik-Detik Menegangkan Evakuasi WNI di Kabul

**KILAS**

23 Evakuasi WNI di Afghanistan Perubahan Rencana dan Kerawanan Ancaman



**Penanggung Jawab**
Teuku Faizasyah
(Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik)
Yusron B. Ambary
(Direktur Diplomasi Publik)

**REDAKTUR**
Joneri Alimin

**ANGGOTA REDAKTUR**
Annisa Paramita
Nadya Almira

**PENYUNTING/EDITOR**
Khariri

**SEKRETARIAT**
Sofiah

**Alamat Redaksi**
Direktorat Diplomasi Publik,
Kementerian Luar Negeri RI, Lt. 12
Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat
Telp. 021- 68663162,3863708,
Fax : 021- 29095331, 385 8035

Tabloid Diplomasi edisi bahasa Indonesia dan Inggris dapat didownload di :
http://www.tabloiddiplomasi.org
Email : tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id

Diterbitkan oleh
Direktorat Diplomasi Publik,
Direktorat Jenderal IDP
Kementerian Luar Negeri R.I.

Gambar Cover:
news.dgtn.com
st2.depositphotos.com


Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber.

Wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

BAGI ANDA YANG INGIN MENGIRIM TULISAN ATAU MENYAMPAIKAN TANGGAPAN, INFORMASI, KRITIK DAN SARAN
SILAHKAN KIRIM EMAIL: tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id

Diplomasi

No. 116 Tahun XIII
15 September 2021

MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI

# BUAH DIPLOMASI MULTILATERAL
## MENGAMANKAN SUPLAI VAKSIN

Seiring dengan merebaknya COVID 19, banyak varian virus baru yang muncul. Indonesia kini menghadapi gelombang kedua COVID sejak bulan juli 2021. Masih rendahnya angka atau jumlah warga Indonesia yang melakukan vaksin membuat penyebaran COVID menjadi tak terkendali. Disamping rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin, ketersedian stok vaksin yang yang di miliki oleh pemerintah juga sangat terbatas. Pemerintah telah memulai program vaksinasi COVID-19 sejak Januari silam. Demi kelancaran program vaksinasi, pemerintah gencar mengamankan stok vaksin, salah satunya melalui diplomasi multilateral.

Kementerian luar negeri menjadi garda terdepan kepada seluruh negara-negara produsen vaksin atau perusahaan vaksin global untuk mendapat pasokan vaksin yang memadai.

Hingga 30 Juli 2021, Indonesia telah mengamankan 174,6 juta vaksin COVID-19. Jumlah ini sudah termasuk total vaksin Sinopharm yang datang kemarin, 30 Juli 2021 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sebanyak 1,5 juta dosis.

**Kementerian luar negeri menjadi garda terdepan untuk melakukan lobi dan pendekatan kepada seluruh negara-negara produsen vaksin atau perusahaan vaksin global untuk mendapat pasokan vaksin yang memadai.**

Sebagaimana data terakhir yang diterima, berikut ini jumlah dosis vaksin COVID-19 yang tiba di Indonesia berdasarkan bentuk dan produsen vaksin hingga per 30 Juli 2021:

1. Vaksin Sinovac Biotech Ltd: total diterima bentuk bahan baku 144.700.280 dan 3.000.000 vaksin jadi (*finished product*)
2. AstraZeneca PLC: vaksin bentuk jadi 14.907.440
3. Sinopharm (China National Pharmaceutical Group): vaksin bentuk jadi 7.500.000
4. Moderna: 4.500.160

Total Kedatangan Vaksin COVID-19 174.607.880

Total Vaksin Jadi 147.207.600 dengan rincian

a. Vaksin yang diolah dari bahan baku vaksin Sinovac: estimasi menjadi vaksin jadi 117.300.000
b. Bentuk jadi: 29.907.600

Keberhasilan mengamankan pasokan vaksin dari berbagai produsen tak lepas dari upaya diplomasi multilateral sejak Oktober 2020 yang dipimpin Kementerian Luar Negeri, dan melibatkan Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, diplomasi vaksin akan terus diperkuat dan diperkokoh. "Untuk membantu upaya pemerintah membangun resiliensi kesehatan dan pemulihan ekonomi."

*WHO Representative* Dr. N. Paranietharan menyatakan, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara-negara berkembang yang sudah memulai vaksinasi. Kami harap kedatangan vaksin dari berbagai produsen semakin menguatkan pelaksanaan program vaksinasi nasional. Penting untuk memberikan vaksin kepada mereka yang paling membutuhkan dan memastikan tidak ada yang tertinggal, ujarnya. Dr Paranietharan lebih lanjut menyampaikan kepemimpinan Indonesia dalam vaksin multilateral dengan duduknya Menlu RI sebagai salah satu *co-chair* AMC *Engagement Group.*

Sementara itu, *Country Representative* UNICEF Indonesia, Debora Comini mengapresiasi Indonesia yang aktif dalam inisiatif COVAX dan menjadi salah satu yang pertama kali bergabung. "Indonesia juga terdepan dalam memastikan untuk membuat kesepakatan suplai vaksin. Kita semua ingin vaksinasi menjangkau sebanyak-banyaknya orang dalam waktu yang secepatnya untuk mengatasi pandemi dan anak-anak bisa kembali ke kehidupan normal, membuka sekolah kembali, dan memastikan layanan kesehatan kembali bisa melayani dengan normal," paparnya.[]

# TANTANGAN DIPLOMASI
## MEMPEREBUTKAN PASOKAN VAKSIN

"Untuk memastikan agar Diplomasi Vaksin berhasil, ke manapun menlu Retno hadir dalam forum internasional termasuk yang pertemuan Menlu G20 di Italia, Menlu selalu membahas isu-isu kesehatan".

Diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di bawah komando Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi merupakan salah satu kunci penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Betapa tidak, sejak awal pandemi tahun lalu, Menlu Retno bersama sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja turut serta mengamankan pasokan vaksin COVID-19.

Pasokan itu tidak hanya datang datang dari sisi komersial semata, melainkan juga bilateral dan multilateral via COVAX. Kendati demikian, semua itu bukannya tanpa tantangan. Sebab, ada situasi di mana negara-negara lain pun memperebutkan pasokan vaksin.

Dalam CNBC Indonesia Economic Update yang tayang pada, Selasa (13/7/2021), Retno buka-bukaan perihal diplomasi Kemenlu RI di tengah pandemi COVID-19.

Dalam keterangannya, Menlu menyampaikan bahwa berbagai upaya terus dilakukan untuk mengamankan pasokan vaksin dari berbagai produsen. Bersama Menteri BUMN (Erick Thohir) dan Menteri Kesehatan pada saat itu (Terawan Agus Putranto), Indonesia sudah mengamankan lebih dari 100 juta dosis baik dari secara komersial namun juga ada dukungan dari bilateral dan melalui jalur multilateral via COVAX.

Sejak 12 Juli Indonesia sudah memiliki 132.727.140 dosis vaksin yang terdiri dari Sinovac 118 juta. Ini paling banyak berbentuk bulk, kemudian AstraZeneca dari COVAX itu 8.228.400, kemudian dari Sinopharm ada 2 juta, kemudian AstraZeneca dari Jepang hampir 1 juta dan akan datang lagi 1 juta dan yang terakhir dari AS itu Moderna kurang lebih 3 juta yang dilewatkan melalui jalur COVAX.

Upaya mendapatkan pasokan vaksin memang banyak dinamikanya dan dinamika itu berdampak pada keterlambatan pasokan dan oleh karena itu Kemenlu mencari cara agar ketersediaan vaksin untuk masyarakat Indonesia tercukupi. Karena itu berbagai cara dilakukan termasuk, mencoba mekanisme dose sharing yang dilakukan Jepang dan AS.

Di dalam konteks multilateral konsep *dose sharing* itu sudah dibahas dari awal. Jadi di awal pandemi kita sudah lakukan dua hal, yakni melakukan penggalangan dana sehingga bisa beli vaksin di pool kemudian dibagi kepada negara-negara yang berpenghasilan menengah ke bawah. Jadi uang untuk beli vaksin. Yang kedua, untuk negara-negara yang memiliki vaksin lebih banyak dari yang dibutuhkan penduduk maka sangat dianjurkan WHO agar kelebihan ini bisa dibagi melalui COVAX.

Untuk memastikan agar Diplomasi Vaksin berhasil, ke manapun menlu Retno hadir dalam forum internasional termasuk yang pertemuan Menlu G20 di Italia, Menlu selalu membahas isu-isu kesehatan. Jadi kesehatan merupakan hal yang utama dalam diplomasi. Dalam setiap momen diplomasi tentu setiap negara pertama kali berjuang untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Ini kita lakukan. Contohnya kita berdiskusi dengan semua pihak terkait seperti produsen vaksin dan hal tersebut akhirnya menghasilkan hak-hal yang konkret dan substansial.[]

Diplomasi

No. 116 Tahun XIII
15 September 2021

MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI

# PRIORITAS DIPLOMASI RI
## MENJAGA KETAHANAN KESEHATAN NASIONAL

Ketahanan kesehatan Indonesia dilakukan secara berlapis, pertama ketahanan kesehatan nasional, ketahanan kesehatan kawasan dan ketahanan kesehatan global.

Upaya kemenlu untuk melakukan diplomasi kesehatan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan jangka panjang. Jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar dengan kebutuhan kesehatan membutuhkan *effort* dan kerja keras diplomasi agar kebutuhan jangka pendek dapat terpenuhi.

Selanjutnya ketahanan kesehatan Indonesia dilakukan secara berlapis, pertama ketahanan kesehatan nasional, ketahanan kesehatan kawasan dan ketahanan kesehatan global. Namun ketahanan kesehatan dunia tidak akan tercapai bila ketahanan nasional negara-negara dunia tidak tercapai.

Oleh karena itu, Indonesia serius untuk menciptakan ketahanan kesehatan. Ketahanan dalam memproduksi obat-obatan karena kita tahu bahwa obat-obatan menjadi bagian penting dan sebagian bahan baku obat masih impor. Dalam kondisi krisis ini usaha untuk mencukupi kebutuhan sangat luar biasa dan kita harus belajar dari pandemi ini salah satunya adalah melakukan lompatan besar dan serius agar kita dapat membangun ketahanan, paling tidak di bidang farmasi soal bahan baku.

Kerjasama di bidang obat-obatan harus dilakukan, seperti yang dilakukan PT Bio Farma melakukan kerja sama dengan CEPI yang melaksanakan RnD vaksin sehingga *in terms of capacity* ada kerja sama multilateral.

Kemenlu juga mendorong masuknya investasi asing untuk kerjasama di bidang vaksin dan obat-obatan di Indonesia. Penguatan kerjasama investasi asing di bidang kesehatan telah dibicarakan dengan berbagai pihak Seperti AS, China dan Rusia. Saat kunjungan *State Counsellor* Wang Yi ke Indonesia, Menlu Retno membahas mengenai kemungkinan Indonesia jadi hub vaksin Asia Tenggara. Kalau melihat kapasitas Indonesia, terlepas dari hanya vaksin COVID-19, tapi juga polio dan sebagainya, maka yang diproduksi Bio Farma merupakan yang terbesar di Asia Tenggara.

Tapi karena perkembangan penyakit dan pandemi perlu adanya penguatan kapasitas. Untuk itu, melalui kunjungan Menlu Rusia ke Indonesia telah dilakukan pembicaraan terkait kerja sama produksi vaksin. Tidak hanya Rusia, Indonesia juga telah melakukan penjajakan dengan produsen vaksin di AS. Hal ini menunjukan keseriusan Indonesia untuk ketahanan kesehatan.

"Lalu kita juga memiliki beberapa kandidat vaksin seperti Vaksin Merah Putih yang mudah-mudahan hasilnya baik karena pengembangan vaksin ini tidak mudah. Tapi mudah-mudahan pengembangan vaksin ini hasilnya bagus sehingga ini jadi penopang ketahanan kesehatan Indonesia di masa depan."[]

# PIMPIN PERTEMUAN COVAX

## MENLU DORONG PERCEPATAN DISTRIBUSI VAKSIN GLOBAL

Negeri RI Retno L.P. Marsudi kembali memimpin pertemuan *virtual* COVAX AMC Engagement Group (EG) ke-5 bersama Menteri Kesehatan Ethiopia (Lia Tadesse) dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada (Karina Gould) pada tanggal 12 Juli 2021.

Dalam pertemuan ke-5 ini, COVAX AMC membahas perkembangan terakhir kerja COVAX Facility terkait pendanaan, ketersediaan vaksin maupun pengiriman vaksin termasuk target yang ingin dicapai pada tahun 2021. Pertemuan juga membahas bagaimana memitigasi resiko kurangnya pasokan vaksin dan persiapan pengiriman vaksin pada kuartal 4 tahun 2021.

Menlu RI memimpin sesi yang membahas tiga isu terkait kepastian pengiriman dan distribusi vaksin, yaitu prediksi pasokan vaksin pada Q3 dan Q4 2021, rencana pengiriman vaksin COVID-19 dan persiapan penerimaan vaksin oleh negara AMC.

Di awal pertemuan, Menlu RI mengulang kembali pernyataan Dirjen WHO yang menyampaikan bahwa saat ini dunia berada pada tahap yang berbahaya dari pandemi. Tingginya tingkat kematian, meningkatnya kasus di banyak negara serta kesenjangan vaksinasi global yang makin melebar adalah situasi yang saat ini dihadapi dunia.

"Banyak negara mengalami lonjakan kasus dan kematian karena varian baru dan pelonggaran kebijakan. Sementara itu, kesenjangan vaksinasi global terus melebar. Jika ini terus berlanjut, dunia tidak akan pernah menang melawan COVID-19," ujar Menlu Retno.

Oleh karena itu, Menlu Retno mendorong percepatan vaksinasi global melalui peningkatan produksi vaksin dengan dilakukan diversifikasi produksi, perluasan portfolio vaksin yang disalurkan oleh COVAX, dan peningkatan kapasitas vaksinasi negara-negara AMC.

Beberapa catatan yang dapat diambil dari penjelasan pihak GAVI per 11 Juli 2021:

- COVAX Facility telah mengirimkan 103 juta dosis ke 135 peserta.
- Gavi Alliance Board juga sudah menyetujui pendanaan untuk mendukung pengiriman vaksin ke negara peserta AMC senilai USD 775 juta.
- 58 negara telah mengajukan pembelian vaksin melalui mekanisme cost-sharing (termasuk Indonesia)

**"Banyak negara mengalami lonjakan kasus dan kematian karena varian baru dan pelonggaran kebijakan. Sementara itu, kesenjangan vaksinasi global terus melebar. Jika ini terus berlanjut, dunia tidak akan pernah menang melawan COVID-19"**

Menlu Retno.

Selain itu, ditengah situasi yang penuh tantangan, tercatat beberapa pekembangan positif yaitu:

Pertama, COVAX meyakini bahwa pasokan vaksin akan terus meningkat dengan bertambahnya vaksin yang telah menerima EUL dari WHO, peningkatan produksi vaksin oleh perusahaan manufatur vaksin dan dimulainya kembali ekspor vaksin yang sebelumnya mengalami hambatan.

COVAX juga telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan pasokan vaksin jangka pendek dan jangka panjang, antara lain dengan pembentukan COVAX Manufacturing Taskforce.

Kedua, semakin besarnya jumlah *dose-sharing* atau berbagi vaksin dari negara yang memiliki kelebihan vaksin akan meningkatkan jumlah pasokan vaksin global yang dapat digunakan oleh negara AMC.

Menurut COVAX Facility, hingga tanggal 12 Juli 2021 ini , terdapat lebih dari 530 juta *dose-sharing* yang siap untuk didistribusikan ke sejumlah negara yang membutuhkan.

Ketiga, COVAX Facility juga menyiapkan mekansime termasuk pendanaan untuk mempersiapkan kapasitas negara AMC dalam menerima vaksin dan menjalankan program vaksinasi nasional di negaranya. COVAX Facility juga menyiapkan berbagai dukungan untuk memastikan kapasitas penerimaan vaksin dan pelaksanaan program vaksinasi nasional.

Dalam diskusi dibahas pula fenomena varian baru dan efikasi vaksin yang ada saat ini dalam menghadapi varian baru khususnya varian Delta. Wakil WHO menjelaskan bahwa hingga saat ini WHO terus mengamati munculnya varian baru dan sampaikan bahwa vaksin setidaknya dapat mengurangi tingkat keparahan infeksi sehingga mengurangi tingkat hospitalisasi dan kematian akibat varian baru.

WHO akan terus memantau tingkat efektifitas vaksin dan diperlukan lebih banyak data dari banyak negara.

COVAX Facility adalah mekanisme multilateral yang berupaya menjamin akses yang merata terhadap vaksin COVID-19 bagi semua negara. Hingga saat ini, Indonesia telah menerima 11.228.460 dosis vaksin melalui COVAX Facility, terdiri dari AstraZeneca dan Moderna. Jumlah ini masih akan terus bertambah dimasa-masa mendatang.

Pertemuan COVAX AMC EG selanjutnya akan diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2021.

(Kementerian Luar Negeri RI)

Diplomasi

No. 116 Tahun XIII
15 September 2021

MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI

# MENLU RI DORONG
## DIVERSIFIKASI PRODUKSI VAKSIN KE NEGARA BERKEMBANG TERKAIT COVID 19

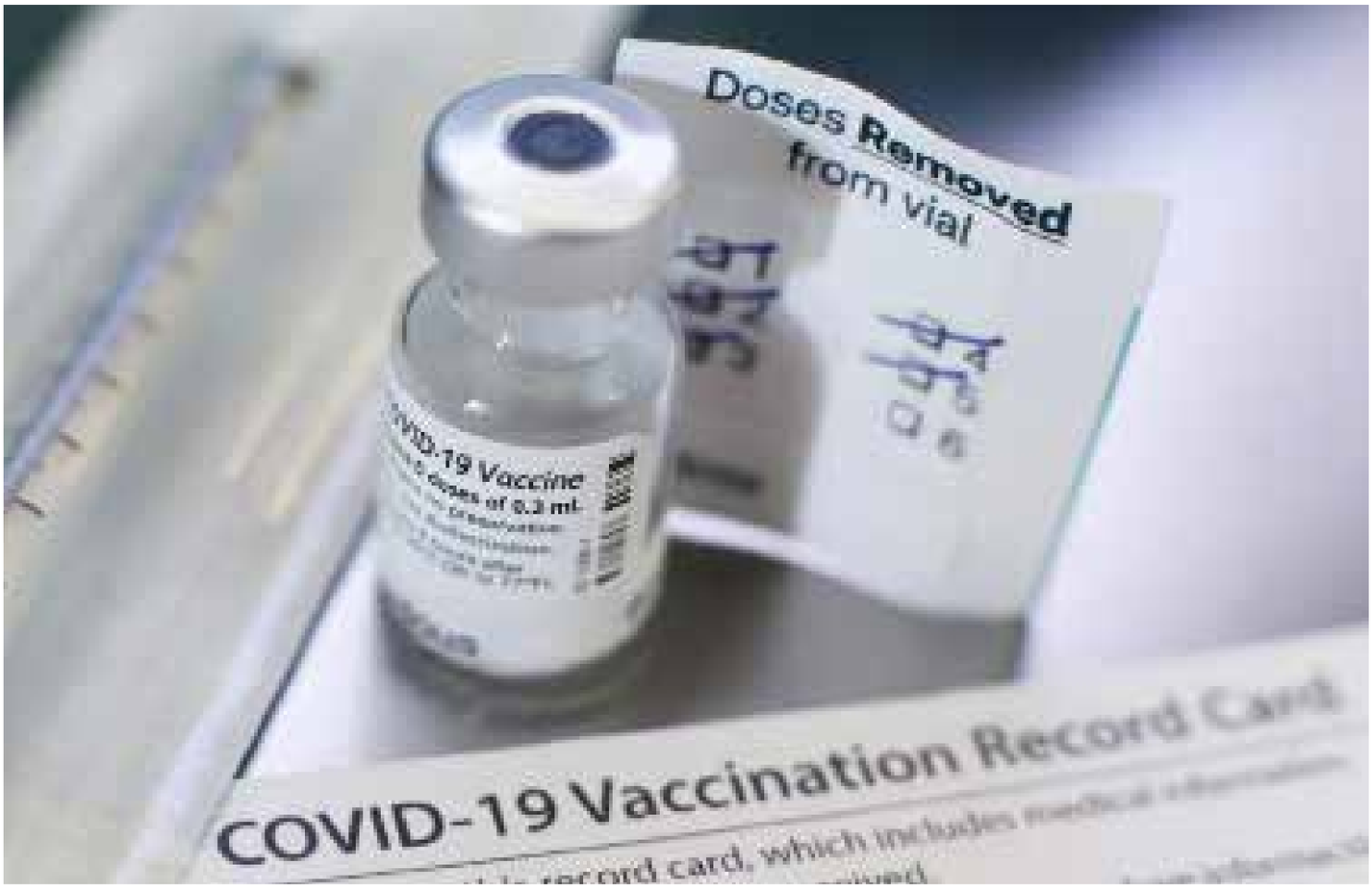


Partisipasi Menlu RI merupakan upaya diplomasi Indonesia yang terus berkomitmen dalam mendorong semua negara untuk mempererat solidaritas dan kolaborasi dalam menanggulangi pandemi termasuk menjadikan vaksin sebagai *global public good* serta kesetaraan akses dan distribusi vaksin bagi semua negara.

"Kita harus mendorong solidaritas dan kerja sama internasional untuk mempercepat vaksinasi global, salah satunya melalui peningkatan kapasitas produksi vaksin. Hal ini dapat dicapai salah satunya melalui diversifikasi produksi vaksin ke negara berkembang," tegas Menlu RI, Retno Marsudi dalam sambutannya pada konferensi internasional bertajuk *"The First Meeting of the International Forum on COVID-19 Vaccine Cooperation"*, yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 5 Agustus 2021.

Konferensi diikuti oleh Sekjen PBB, Dirjen WHO, Menteri Luar Negeri dan Pejabat Tinggi lebih dari 23 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika serta perwakilan Organisasi Internasional lainnya.

Lebih lanjut, Menlu RI juga menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk membantu negara berkembang dalam hal penguatan infrastruktur esensial, pusat penelitian, jalur produksi, fasilitas *cold storage*, dan sumber daya manusia. Pada saat yang sama, kolaborasi internasional harus dapat memfasilitasi akses ke bahan baku, pembebasan HKI, transfer teknologi, termasuk vaksin mRNA serta skema pembiayaan yang sehat.

Menlu RI juga sebagai *Co-Chair* COVAX AMC-EG menyampaikan pentingnya dukungan semua negara kepada mekanisme COVAX, sebagai satu-satunya platform global yang menjamin kesetaraan akses bagi semua. Selain itu, COVAX juga perlu segera mengeksplorasi alokasi vaksin untuk 20% populasi khususnya untuk negara berpenghasilan rendah.

Partisipasi Menlu RI merupakan upaya diplomasi Indonesia yang terus berkomitmen dalam mendorong semua negara untuk mempererat solidaritas dan kolaborasi dalam menanggulangi pandemi termasuk menjadikan vaksin sebagai *global public good* serta kesetaraan akses dan distribusi vaksin bagi semua negara.

Konferensi menghasilkan *outcome document* berupa *Joint Statement of the International Forum on COVID-19 Vaccine Cooperation*. Negara-negara yang berpartisipasi pada konferensi ini termasuk Argentina, Brazil, Chile, China, Kolombia, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, Hungaria, Indonesia, Kenya, Malaysia, Meksiko, Maroko, Pakistan, Filipina, Federasi Russia, Serbia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Thailand, Turki, UEA, dan Uzbekistan. Selain itu juga berpartisipasi perusahaan vaksin dan lembaga riset vaksin dari negara terkait seperti Sinopharm, Sinovac, Bio Farma dan Gamelaya Center Rusia untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah, lembaga riset dan perusahaan vaksin untuk penanganan pandemi COVID-19.[]

# MELAWAT KE AS DALAM PENANGANAN COVID-19

## MENLU RI BERHASI MENDAPAT TAMBAHAN DUKUNGAN VAKSIN *DOSE SHARING* AS SEBANYAK 3.5 JUTA DOSIS

Menlu RI, Retno L. Marsudi melakukan lawatan ke Amerika Serikat atas undangan Menlu AS, Antony Blinken. Kunjungan Menlu Retno Ke AS diagendakan untuk membahas berbagai isu strategis di kawasan, termasuk penguatan kerjasama melalui implementasi *ASEAN Outlook in the Indo-Pacific* serta membahas kerja sama penanganan COVID-19.

Sebagai hasil diskusi intensif yang dilakukan oleh Menlu RI, baik dengan *Secretary* Blinken maupun dengan NSA Jack Sullivan, Amerika Serikat telah memberikan tambahan dukungan vaksin *Dose-Sharing* AS melalui *COVAX Facility*, sebanyak 3.5 juta dosis yang tiba saat ini di Jakarta. Ini adalah ketibaan vaksin Moderna dari AS tahap 3.

Sebelumnya Indonesia telah menerima 4.500.160 dosis vaksin dari AS dalam 2 tahap (3,000,060 dan 1,500,100).

Dengan kedatangan hari ini, maka jumlah vaksin Moderna, dukungan kerja sama Pemerintah AS melalui *COVAX Facility* yang telah diterima Indonesia adalah 8,000,160 dosis vaksin jadi.

Pada Senin, 2 Agustus 2021, sekitar pukul 15.40, Indonesia juga akan menerima 620,000 vaksin Astra Zeneca dukungan kerja sama *dose-sharing* bilateral dari Pemerintah Inggris.

Dukungan vaksin dari Inggris ini juga merupakan hasil komunikasi intensif yang dilakukan dengan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab.

Pembicaraan untuk mematangkan kerjasama *dose-sharing* dilakukan oleh menlu RI dan Menlu Inggris dilakukan di sela-sela pertemuan G-20 di Mattera, Italia pada tanggal 29 Juni 2021.

Kerjasama melalui *dose-sharing mechanism* merupakan salah satu cara yang penting untuk dilakukan agar dunia dapat keluar dari pandemi ini.

dalam catatan Kementerian Luar Negeri, Indonesia telah menerima di titik ketibaan 178,357,880 dosis vaksin yang terdiri dari curah atau *bulk* sebesar 144.700.280 dan vaksin jadi sebesar 33,657,600.

Jika dari sisi sumbernya maka dari *COVAX Facility*, saat ini Indonesia telah menerima pengiriman sebanyak 19.704.960 dosis vaksin secara gratis semuanya merupakan vaksin yang sudah jadi.

Pemerintah akan terus bekerja keras untuk mengamankan pengadaan vaksin bagi kepentingan rakyat Indonesia.

Indonesia sendiri, hingga saat ini telah menyuntikkan lebih dari 67 juta dosis vaksin, tepatnya 67.761.337 dosis, sekitar 24,49% dari total populasi Indonesia.

Dengan terus berdatangannya vaksin dari berbagai sumber ke Indonesia, kita dapat mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan penyebaran dan menekan angka hospitalisasi dan kematian.[]

Diplomasi

No. 116 Tahun XIII
15 September 2021

MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI

# KEMITRAAN STRATEGIS RI-AS

## INDONESIA DAN AS PERKUAT KERJA SAMA ATASI PANDEMI DAN STABILITAS KAWASAN

Washington DC, Amerika Serikat – Pada Senin, 2 Agustus 2021, Menlu RI, Retno L.P. Marsudi, telah bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional AS (NSA), Jake Sullivan di Gedung Putih. Keduanya membahas berbagai isu bilateral guna memperkuat kemitraan strategis Indonesia-AS. "Kehadiran saya di Washington DC adalah bukti nyata komitmen Indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral RI-AS," sebut Retno.

Menlu Retno dan NSA Sullivan membahas kerja sama untuk mengatasi pandemi COVID-19. Pada pertemuan tersebut, NSA Sullivan menyampaikan komitmen **tambahan dukungan kerja sama AS sebesar US$ 30 juta** berupa pasokan peralatan oksigen, alat kesehatan dan obat-obatan. Dengan dukungan tambahan ini, maka **total dukungan kerja sama AS sejak awal pandemi sebesar US$ 65 juta.**

Selain dukungan ini, AS telah memberikan dukungan kerja sama *dose-sharing* vaksin Moderna melalui *COVAX Facility* yang berjumlah **8,000,160 dosis.** Sebagaimana diketahui, tambahan vaksin Moderna sebanyak 3.5 juta telah tiba di Jakarta, Minggu, 1 Agustus 2021.

Untuk itu, Menlu Retno sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada AS atas dukungannya kepada Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Selain itu, Menlu RI juga membahas kerja sama jangka panjang Indonesia-AS di bidang kesehatan agar kapasitas nasional, regional dan global lebih baik dalam menghadapi pandemi mendatang. "Indonesia mengharapkan dukungan AS untuk dapat membangun kapasitas Indonesia dalam membuat vaksin teknologi terkini yang berbasis mRNA dan obat terupatik penyakit menular".

Menlu RI dan NSA Sullivan juga membahas berbagai isu kawasan dan global yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama kedua negara yaitu perkembangan di Myanmar, kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, proses perdamaian di Afghanistan dan Lingkungan Hidup.

Terkait perkembangan di Myanmar, NSA Sullivan sampaikan dukungan AS terhadap peran ASEAN, termasuk dalam upaya merestorasi demokrasi dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Myanmar dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Menlu Retno dan NSA Sullivan menyadari pentingnya peran semua pihak untuk dapat terus berkontribusi bagi upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo Pasifik. Indonesia menyampaikan ASEAN terbuka melakukan kerjasama konkrit bagi pelaksanaan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, dengan fokus pada 4 prioritas, yaitu kerjasama di bidang maritim, konektivitas, SDGs dan perdagangan investasi.

Menyinggung isu Afghanistan, keduanya berkomitmen untuk terus mendorong proses perdamaian di Afghanistan yang diterima oleh seluruh pihak serta sesuai keinginan rakyat Afghanistan. Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia akan melanjutkan kerjasama dengan Afghanistan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan.

Selain dengan NSA Sullivan, pada hari yang sama, Menlu Retno juga bertemu dengan Senator Tammy Duckworth, dari Illinois. Senator Tammy yang pernah tinggal di Indonesia lebih dari 7 tahun itu sampaikan komitmennya untuk terus mendorong perkuatan kemitraan strategis Indonesia dan AS. Senator Tammy adalah termasuk dari orang yang mendorong upaya kolaborasi Indonesia-AS dalam menghadapi pandemi ini. Keduanya juga bertukar fikiran mengenai perkembangan isu kawasan yang menjadi perhatian bersama seperti Myanmar, Afghanistan dan Indo-Pasifik.

Dalam rangkaian pertemuan hari ini, Menlu Retno juga bertemu dengan beberapa industri farmasi dan kesehatan diantara Eli Lilly (perusahaan obat-obatan); dan CEO Arcturus (Farmasi bergerak dalam pembuatan vaksin mRNA) dan Baylor *College of Medicine* (pusat riset pembuatan vaksin protein rekombinan).

Dalam pertemuan dengan Eli Lilly, perusahaan tersebut memberikan dukungan obat-obatan untuk COVID-19 sebesar US 51,6 juta. Dalam pertemuan dengan perusahaan pengembang vaksin, dibahas kemungkinan kolaborasi pengembangan vaksin berbasis mRNA di Indonesia agar Indonesia memiliki kemampuan pengembangan vaksin berbasis teknologi terbaru serta kerja sama *beyond COVID-19*.[]

# PERTEMUAN KE-2 SHERPA G20:
## INDONESIA DORONG IMPLEMENTASI KONKRET KESEPAKATAN G20

Jakarta, Indonesia - "Kesepakatan G20 harus dapat ditindaklanjuti dengan implementasi konkret," ujar Co-Sherpa G20 Indonesia, Duta Besar Dian Triansyah Djani dalam pernyataannya di Pertemuan ke-2 G20 Sherpa yang dilaksanakan secara virtual selama dua hari (12-13/07/2021).

Dubes Djani yang menjabat sebagai Staf Khusus Menlu untuk Penguatan Program-Program Prioritas beserta Dr. Edi Pambudi, Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam, telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai *Co-Sherpa* G20 Indonesia.

Bersama para pejabat tinggi (atau biasa disebut "Sherpa") dari negara anggota G20 lainnya, Co-Sherpa G20 Indonesia menekankan pentingnya kesepakatan G20 di tahun 2021 dapat mendukung pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca pandemi.

Sherpa sendiri berasal dari bahasa Tibet yang berarti penunjuk jalan, dimana para Sherpa G20 berperan dalam menavigasi berbagai kerja sama yang terlaksana dalam kerangka G20 sekaligus membuka jalan ke arah tercapainya kesepakatan bagi para Pemimpin G20.

Indonesia sebagai calon Presiden G20 tahun 2022 telah terlibat sebagai salah satu negara Troika bersama Arab Saudi yang merupakan Presiden G20 tahun 2020 dan Italia yang memegang Presidensi G20 untuk tahun 2021. Presidensi Italia tahun ini mengambil tema "Manusia, Planet, Kesejahteran" (*People*, *Planet*, *Prosperity*).

Pertemuan Sherpa kali ini membahas perkembangan kerja sama dan perundingan G20 di berbagai kelompok kerja (*working groups),* antara lain di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, anti-korupsi, budaya, pertanian, pembangunan, kesehatan, keuangan, perdagangan dan investasi, dan ekonomi digital.

Secara khusus *Co-Sherpa* G20 Indonesia mendorong agar G20 bekerja sama dalam menghadapi pandemi saat ini. G20 perlu memastikan akses vaksin COVID-19 yang adil dan terjangkau, mendukung fleksibilitas dari kesepakatan TRIPS (*Trade-related Intellectual Property Rights*), dan memberikan transfer teknologi serta pembangunan kapasitas produksi di negara berkembang.

Sementara itu, agar dunia dapat segera bangkit dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, *Co-Sherpa* G20 Indonesia mengangkat pentingnya implementasi berbagai kesepakatan G20 dan peningkatan kerja sama sektor-sektor tertentu seperti di sektor kesehatan, pendidikan dan kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja terampil serta pentingnya pendidikan vokasi, termasuk *reskilling* dan *upskilling* untuk mereka yang terdampak pandemi. Juga ditekankan pentingnya meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perdagangan dunia dan perlunya memberikan perhatian lebih pada isu digitalisasi yang merupakan *cross-cutting issue*.

G20 merupakan forum 19 negara dan sebuah organisasi regional (Uni Eropa) yang mewakili 85% GDP dunia, 75% perdagangan dunia, 80% investasi global, dan dua pertiga penduduk dunia. G20 memiliki kapasitas besar untuk menciptakan momentum kesepakatan multilateral. Oleh karena itu, Indonesia terus memastikan agar G20 memberikan sumbangsih konkret terhadap penanganan krisis akibat pandemi COVID-19.
(Sumber: Kementerian Luar Negeri)

Diplomasi

No. 116 Tahun XIII
15 September 2021

MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI

# SINGAPURA KIRIM BANTUAN
## PENANGANAN COVID-19 KEPADA INDONESIA

Menlu Vivian juga memberikan apresiasi kepada Indonesia yang saat di awal pandemi memberikan bantuan berupa perlengkapan untuk membangun tempat isolasi pasien COVID-19 di Singapura.

Indonesia dan Singapura menunjukkan kembali hubungan baik di antara kedua negara dengan memberikan bantuan bagi penanganan COVID-19 di Indonesia. Bantuan yang diberikan Jumat (09/07/2021) terdiri dari peralatan kesehatan seperti *ventilator, oxygen concentrator*, tabung oksigen, serta masker medis serta alat pelindung diri.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan menyerahkan bantuan Pemerintah Singapura kepada Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, di Paya Lebar Air Base Singapura. Bantuan yang dikirim dengan dua tahap pengiriman secara detail terdiri dari 200 ventilator, 756 tabung oksigen cylinder, 600 *oxygen concentrators* dan beragam kebutuhan APD. Serah terima tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertahanan Singapura dan *Singapore Armed Force* (SAF).

Bantuan penanganan COVID-19 ini ditujukan kepada Kemenkes RI, Kemenhan RI, dan Mabes TNI. Pada tahap pertama dikirimkan sebanyak 200 ventilator, 250 tabung oksigen kosong, 30 *oxygen concentrator*, serta peralatan medis dengan menggunakan 2 (dua) pesawat C-130 milik RSAF (Angkatan Udara Singapura). Sisa bantuan lainnya akan dikirimkan menggunakan Kapal Angkatan Laut Singapura (RSN) pada 11 Juli 2021 dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Menlu Vivian menyampaikan bahwa Singapura sebagai negara tetangga terdekat Indonesia akan terus mendukung dan membantu Indonesia dalam situasi sulit seperti saat ini. Menlu Vivian juga memberikan apresiasi kepada Indonesia yang saat di awal pandemi memberikan bantuan berupa perlengkapan untuk membangun tempat isolasi pasien COVID-19 di Singapura. Vivian berharap, bantuan ini dapat membantu Indonesia dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. "Kita tahu varian Delta menular dengan sangat cepat dan tentunya kita berharap agar Indonesia bisa segera mampu mengendalikan kasus penularannya," ujar Menlu Singapura.

Dubes Suryo Pratomo menyatakan, dalam situasi yang sulit di mana peningkatan kasus yang begitu tinggi, yang paling dibutuhkan adalah sahabat sejati. "Singapura menunjukkan sebagai sahabat sejati bagi Indonesia. Bukan hanya Pemerintah Singapura yang begitu cepat memberikan bantuan, tetapi juga perusahaan serta masyarakat Singapura yang terpanggil untuk memberikan bantuan bagi penanganan COVID-19 di Indonesia," kata Dubes Tommy.

Perusahaan seperti Temasek bekerja sama dengan perusahaan Indonesia, Barito Pacific memberikan bantuan sebanyak 1.500 *oxygen concentrator* kepada Indonesia. Bantuan tersebut saat ini berada di Shanghai, China dan Pemerintah Indonesia mengambil langsung dari Shanghai dengan menggunakan pesawat kargo komersial.[]

(Sumber: KBRI Singapura)

## DUKUNGAN VAKSIN, OKSIGEN, DAN ALKES DARI PEA DAN SINGAPURA TIBA DI JAKARTA

Pada Jumat dini hari (16/07/2021), telah tiba dukungan vaksin, oksigen dan alat kesehatan dari Persatuan Emirat Arab (PEA). Selain itu, pada Rabu (14/07/2021) telah tiba pula dukungan *oxygen concentrator* dari Singapura.

Dukungan gelombang pertama dari PEA, meliputi:

- 250.000 dosis vaksin Sinopharm;
- 450 unit tabung oksigen 40 liter;
- 150 unit konsentrator oksigen portable; dan
- 20 ton peralatan pengaman medis (APD, masker, sarung tangan, dan lain-lain)

Sementara dukungan dari Pemerintah Singapura, meliputi:

- 250 tabung oksigen isi kapasitas 50 liter;
- 2 buah ISO Tank;
- 570 *Oxygen Concentrator*;
- 600 *nasal cannula*; dan
- 600 *bubble humidifier*.

Sebelumnya, Singapura juga mengirim dukungan berupa 200 ventilator, 256 tabung oksigen kapasitas 50 liter dan alat kesehatan lainnya dan telah tiba di Indonesia 9 Juli 2021.

Indonesia menyampaikan penghargaan atas dukungan yang disampaikan PEA dan Singapura tersebut.

(Sumber: Kementerian Luar Negeri)

# LANGKAH JITU DIPLOMASI
## MULTILATERAL INDONESIA DUKUNG PALESTINA

"Konflik Palestina-Israel merupaka konflik asimetris. Tidak tepat jika penyelesaiannya menggunakan cara mediasi, tetapi harus menggunakan solusi penegakan hukum Internasional."

**Febrian Alphyanto Ruddyard**

Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kemenlu RI

Menlu RI Retno Marsudi memimpin debat terbuka Dewan Keamanan PBB DK PBB dengan tema ?Menabur Benih Perdamaian: Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB? di Markas PBB di New York, Rabu (7/5/19)(Dok. Humas Kementerian Luar Negeri)

Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan bagi Palestina. Bentuk dukungan tersebut melalui Diplomasi multilateral di kancah Internasional. Hal itu disampaikan Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard.

Menurutnya, ada lima pilar sebagai landasan dukungan Indonesia kepada Palestina. **Pilar pertama,** Palestina memiliki wilayah, Pemerintah, rakyat dan ini merupakan dasar dari sebuah negara. Kita tidak sepakat dengan *illegal settelement*, karenanya nanti wilayahnya akan dihabiskan.

Diplomasi kita jalankan di Majelis Umum dan Dewan Keamanan (DK) PBB. Isu penting yang menjadi perhatian kita adalah isu perbatasan dan kependudukan. Terlebih lagi, adalah bagaimana mengembalikan isu rakyat, hak kembali itu ada. Kalau bicara *deal of the century* merugikan Palestina. Kalau dipreteli satu-satu nanti tidak ada negara Palestina yang punya wilayah, teritori dan rakyat. Untuk itu, kita bersikeras soal *illegal setlement* agar mengembalikan hak kembali rakyat.

**Pilar kedua** pengakuan. Bentuk dukungannya adalah bagaimana Palestina diakui menjadi sebuah Negara dan sejajar dengan bangsa lain. Masalahnya, masih banyak Negara yang tidak mengakui keberadaan Palestina. Upaya ini terus kita gaungkan di dunia Internasional agar Palestina sama atau sejajar dengan Negara lain. Misalnya, bagaimana Palestina masuk menjadi anggota WHO, UNESCO, meski banyak Negara yang menentang. Bagi kita Palestina itu adalah sebuah Negara, tinggal masalahnya bagaimana Pelestina bisa diterima dan diakui oleh PBB.

**Pilar ketiga** *capacity building*, kalau Pemerintah Palestina sudah diakui maka harus disiapkan pengembangan kapasitas. Mempunyai kapasitas di seluruh perangkat, jadi bila sudah diakui sebagai Negara maka Palestina harus mempesiapkan kapasitas pemerintahan yang *professional* dan *capable* diseluruh perangkat dan lapisan pemerintahan.

**Pilar keempat** humanitarian. Dalam hal ini bukan hanya pemerintah tapi juga melibatkan NGO yang berarti satu paket. Jadi, bila saat di Palestina blokade maka kita harus menyiapkan bantuan kemanusia sebagai suatu keniscayaan.

**Pilar kelima**, harus ada tekanan ke Israel. Tekanan kepada Israel kita berikan dimana-mana. Misalnya terhadap aplikasi keanggotaan Israel pada berbagai organisasi internasional dan pencalonan Israel sebagai anggota biro di lingkungan badan-badan PBB, termasuk Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina memperoleh kemerdekaannya sebagai suatu negara berdaulat. Membuka hubungan diplomatik dengan Israel tidak akan menjamin selesainya isu Palestina. Bahkan, justru menunjukkan bahwa Israel bisa mengumpulkan Negara yang selama ini berseberangan. Kita harus paham yang kita hadapai adalah adalah Negara yang cukup punya *record* panjang dalam hal menepati janji dan melanggar hukum internasional. Kita melihat konflik Palestina-Israel sebagai konflik asimetris. Jadi, tidak cocok digunakan cara mediasi yang cocok adalah penegakan hukum Internasional. Silahkan Negara mana saja yang mau jadi juru damai, tentu kita awasi dan bukan menetapkan sesuai kemauan sendiri. Seperti *deal of the century* usulan Donald Trump yang di tolak oleh rakyat Palestina.

Solusi perdamaian Palestian-Israel hendaknya jangan sampai mencederai elemen dalam resolusi dewan keamanan PBB yang sudah jelas sebagai hukum Internasional.

### Status Palestina di PBB *Non Member Observer State*

Charter PBB menetapkan bahwa aplikasi keanggotaan suatu negara dapat disetujui dengan syarat memperoleh rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Rekomendasi DK PBB ini dapat diperoleh hanya dengan adanya keputusan DK PBB tanpa adanya veto dari kelima Anggota Tetap DK PBB. Selama ini masih sulit untuk dapat memperoleh dukungan yg bulat dari seluruh Anggota Tetap DK PBB, khususnya dari negara yang selama ini selalu mendukung Israel. Selama mereka tidak memberikan dukungan, sampai kapanpun status Palestina akan tetap menjadi *non member observer state*. Sebelumnya, status Palestina di PBB adalah entitas pemantau non anggota (non member observer entity) lalu posisinya naik menjadi negara pemantau non anggota (*non member observer state*). Dari sisi status di PBB, Pales-

tina sudah mengalami kemajuan. Jika dulu Palestina tidak dianggap negara, sekarang sudah dianggap negara.

Istilah atau status *observer* bisa dari organisasi, delegasi Internasional. Hanya saja, masalahnya adalah tidak bisa menjadi member sebelum ada rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB.

**Diplomasi Indonesia Melindungi Palestina dari "Trend Licik" Israel**

Pertama, isu Palestina harus melibatkan mekanisme multilateral dan menjadi komitmen Internasional. Untuk itu, perlu ada Negara yang memiliki kekuatan besar sehingga bisa berperan sebagai mediator. Kedua, harus ada Negara yang mengingatkan bahwa isu Palestina-Israel menjadi pekerjaan rumah bagi dunia internasional yang belum selesai dan ketiga, harus ada Negara yang berperan untuk menekan Israel.

Indonesia bisa berperan dalam ranah yang kedua dan ketiga yaitu selalu mengingatkan serta melakukan penekanan. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki kapasitas menjadi mediator untuk mendamaikan Palestina-Israel. Negara besar seperti Amerika dan Inggris saja tidak bisa berbuat apa-apa dalam upaya mediasi mendamaikan antara Palestina dan Israel. Langkah Indonesia bisa melakukan koalisi dengan dunia internasional dan membagi divisi serta memasukkan lima pilar.

Indonesia akan terus mengingatkan adanya parameter yang disepakati saat penjajahan Palestina terjadi. Di masa COVID-19 isu Palestina tenggelam. Diplomasi Indonesia akan terus mengingatkan kepada dunia internasional, setiap hari masih terjadi pelanggaran HAM, pendudukan dan kejahatan di Palestina yang dilakukan Israel. Untuk itu, langkah yang dilakukan Menteri Retno saat terjadi serangan Israel ke Palestina, Menlu langsung terbang ke DK PBB di New York. Yaitu: menginisiasi di berbagai forum untuk pembahasan serangan Israel ke Majelis Umum PBB, bicara di OKI, serta di GNB. Langkah selanjutnya adalah mengangkat isu Palestina di berbagai Forum misalnya di DK PBB.

Terlebih penting lagi, berbicara isu Palestina-Israel tidak saja generasi saat ini saja. Untuk bisa merubah kebijakan Dewan Keamanan PBB tidak cukup *goverment to goverment* (Pemerintah ke Pemerintah), antar parlemen, generasi ke generasi. Sehingga, ketika lima Negara pemegang Veto itu berubah, lalu muncul tokoh pemimpin di negera tersebut yang memiliki perhatian khusus terhadap Palestina. Diharapkan dengan perubahan pemimipin di Negara pemegang Veto yang Pro Palestina maka situasi juga akan berubah.[]

# MENLU RI SERUKAN DUKUNGAN
## TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA DI KTM GNB

KTM *Mid-Term* GNB telah berlangsung secara virtual pada tanggal 13-14 Juli 2021 di bawah keketuaan Azerbaijan. Menteri Luar Negeri RI Retno L.P Marsudi memimpin Delegasi RI pada pertemuan tersebut.

Dalam pernyataanya, Menlu RI menyampaikan bahwa GNB masih menghadapi tantangan yang sama sejak berdiri 60 tahun yang lalu, yaitu isu-isu mengenai kekuatan besar dunia, ketidaksetaraan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial-ekonomi.

Isu-isu tersebut menjadi lebih rumit dengan adanya berbagai tantangan masa kini. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dan nilai-nilai GNB, termasuk multilateralisme, menjadi semakin relevan.

Pada pertemuan, Menlu menyampaikan 3 (tiga) area di mana GNB dapat bersinergi dan menjadi bagian dari solusi, yaitu:

***Pertama, akses terhadap vaksin COVID-19 yang berkeadilan.***

Kesenjangan vaksinasi saat ini sangat besar. Sebagian besar negara maju telah menyuntikkan vaksin setara dengan 70% populasi mereka, sementara sebagian besar dari negara GNB masih di bawah 10%.

Menlu juga menyampaikan bahwa prioritas negara GNB adalah untuk memperkecil kesenjangan ini dan mempercepat vaksinasi di negara berkembang. GNB dapat berkontribusi pada upaya ini dengan menyerukan lebih banyak *dose-sharing*, memperkuat dukungan terhadap COVAX *Facility*, dan mendukung TRIPS *waiver negotiation.*

***Kedua, kerja sama untuk pemulihan ekonomi.***

Pandemi telah mendorong ratusan juta orang ke jurang kemiskinan dan menghambat kemajuan kita menuju SDG. Oleh karena itu, GNB harus bekerja bersama untuk memastikan partisipasi dari negara-negara berkembang dalam arsitektur keuangan internasional, mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil dan persyaratan donor, serta meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan.

"Indonesia akan menggunakan Presidensi G20 tahun depan untuk memajukan kepentingan negara berkembang," tegas Menlu.

***Ketiga, kemerdekaan Palestina.***

Menlu sampaikan bahwa hingga saat ini, Palestina masih menjadi satu-satunya negara yang belum mencapai kemerdekaannya. Seluruh negara anggota GNB harus mengakui negara Palestina, mendukung peluncuran kembali negosiasi multilateral yang kredibel, dan memastikan akses kemanusiaan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina.

Dalam akhir pernyataannya, Menlu sampaikan penegasan bahwa GNB memiliki kekuatan dari segi ukuran dan jumlah negara anggota. Menlu meyakinkan bahwa negara GNB dapat menerjemahkan kekuatan tersebut menjadi pengaruh positif bagi dunia jika kita terus bekerja sama dan tetap setia pada Dasasila Bandung.

KTM menghasilkan *Political Declaration* yang menegaskan posisi GNB dalam berbagai isu global. Delri ikut berkontribusi dalam pengajuan sejumlah usulan paragraf mengenai pandemi COVID-19 (distribusi vaksin berkeadilan), peran perempuan dalam misi perdamaian (*women in peacekeeping),* pelucutan senjata, peran negara *observer*, perubahan metode kerja GNB, dan isu Palestina. KTM juga mengesahkan Rusia sebagai negara pengamat (*observer*) GNB.

(Sumber: Kementerian Luar Negeri)

# SEJARAH PANJANG KONFLIK ISRAEL – PALESTINA DAN KOMITMEN DUKUNGAN INDONESIA

"Konflik Israel-Palestina bukan konflik agama. Isu agama digunakan sebagai *justification reason*, padahal konflik ini adalah penjajahan Israel atas bangsa Palestina."

Dirjen Abdul Kadir Jailani

Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Di tengah meningkatnya tren normalisasi hubungan dengan Israel dan konflik yang tidak seimbang antara Israel-Palestina, Indonesia dengan tegas, konsisten dan tidak kenal lelah menyuarakan isu Palestina di kancah internasional.

Hal ini tergambar jelas dalam perbincangan kami dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Abdul Kadir Jailani, pada awal Agustus 2021 lalu, yang mengupas tuntas upaya diplomasi Indonesia terkait isu Israel – Palestina.

Dirjen Abdul Kadir Jailani menegaskan bahwa akar masalah konflik Israel – Palestina adalah sejatinya penjajahan Israel atas Palestina. Pasalnya, Israel telah dan terus-menerus merampas hak hidup warga Palestina di tanah airnya sendiri.

Diplomasi Indonesia dalam isu Israel – Palestina dilandaskan pada hukum internasional dan amanat konstitusi pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

**Awal Sejarah Palestina**

Awalnya, Palestina adalah sebuah bagian dari wilayah Kekaisaran Ottoman. Selama Perang Dunia I, janji kemerdekaan yang diberikan pemerintah kolonial Inggris membuat bangsa Palestina memberikan dukungannya kepada Inggris.

Sayangnya, janji tinggal janji. Kepergian Ottoman dari tanah Palestina tidak membuat Inggris memberikan kemerdekaan yang dijanjikan. Pada tahun 1917, Inggris bahkan mengambil langkah yang merugikan bangsa Palestina di kemudian hari, dengan adanya Deklarasi Balfour. Diaspora Yahudi dapat kembali ke tanah Palestina dan mendirikan negara Israel.

"Awalnya, berbagai etnis yang ada di Palestina hidup berdampingan, baik itu Arab, Yahudi, Afrika, dan lain-lain," terang Dirjen Abdul Kadir Jailani.

"Pada masa itu, Komunitas Yahudi maupun Arab Palestina bahkan sama-sama mengidentifikasi diri sebagai penduduk asli Palestina. Yang membedakan hanya penggunaan bahasa, yakni Ibrani untuk komunitas Yahudi, dan Arab untuk komunitas Arab Palestina," tambahnya.

**Penjajahan di atas Tanah Palestina**

Perubahan baru terjadi saat komunitas Yahudi Israel memproklamasikan upaya aneksasi mereka dan melakukan serangan terhadap komunitas lainnya. Pada saat itu, sekitar 540 distrik serentak dikuasai oleh komunitas Yahudi Israel. Di tahun 1936-1938, komunitas ini melakukan berbagai tindakan kekerasan dan terorisme.

Menyikapi situasi ini, pada tahun 1948, PBB mengeluarkan resolusi 181 terkait peta yang membagi tanah Palestina menjadi 2 (dua) wilayah. Israel mendapatkan 40% luas wilayah, sementara selebihnya menjadi milik Palestina. Atas keputusan tersebut, Palestina menolak. Seluruh tanah Palestina yang dulu berada di bawah mandat Inggris sudah seharusnya menjadi milik rakyat Palestina.

"Klaim atas suatu wilayah tidak bisa dilakukan hanya dengan berlandaskan pada keturunan, ras atau genetik. Indonesia jelas tidak bisa menyatakan akan menduduki negara lain, hanya karena dulu negara tersebut pernah menjadi bagian Kerajaan Majapahit," papar Dirjen Abdul Kadir Jailani. Ditambahkannya bahwa "Tanah itu adalah milik Palestina. Apa legalitas hak diaspora Yahudi yang baru datang dalam membentuk negara sendiri?"

Dalam hukum internasional itu ada hak menentukan nasib sendiri. Suatu bangsa memiliki hak kolektif yang mengacu pada kemauan suatu bangsa dan wilayah tersebut untuk memerdekakan diri dalam konteks perlawanan terhadap penjajahan," kata Dirjen Abdul Kadir Jailani.

Penolakan Palestina atas pembagian wilayah ini membuat Israel kemudian meluncurkan serangan demi serangan. Di setiap peperangan, Israel menambah luas wilayahnya. Puncaknya adalah di tahun 1967, ketika Israel menyerbu masuk Palestina dan hanya meninggalkan wilayah Gaza.

Situasi ini mendorong PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatur wilayah Gaza dan Tepi Barat. Israel kemudian melepas wilayah Gaza, namun tidak dengan Tepi Barat. Di Tepi Barat, aneksasi merangkak (*creeping annexation*) dilakukan terus-menerus terhadap wilayah Palestina.

Seiring bergulirnya waktu, berbagai perundingan perdamaian telah dilakukan. Namun, kedua belah pihak tidak pernah mencapai kata sepakat mengenai pembagian wilayah. Hal ini diperparah dengan kepentingan berbagai pihak, seperti normalisasi dengan negara-negara Arab, yang membuat konflik ini semakin dinamis.

**Indonesia Konsisten Mendukung Perjuangan Palestina**

Menyikapi fenomena meningkatnya dukungan masyarakat dan negara Arab terhadap Israel, Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas penegasan komitmen dukungan Indonesia hingga terwujudnya Palestina yang merdeka.

Menurut Dirjen Abdul Kadir Jailani, fenomena munculnya dukungan sekelompok kecil masyarakat di tanah air kepada Israel disebabkan adanya ketidakpahaman atas konflik Israel – Palestina.

"Konflik Israel-Palestina bukan konflik agama. Isu agama digunakan sebagai *justification reason,* padahal konflik ini adalah penjajahan Israel atas bangsa Palestina," tegasnya. Indonesia tidak akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, hingga terwujudnya *two state solution.*

"Parameternya juga jelas; Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina, ada *right to return* bagi masyarakat Palestina serta penghentian pembangunan pemukiman Yahudi," jelas Dirjen Abdul Kadir Jailani. "Masalahnya, Israel inginnya *one state solution,* ini yang membuat kondisi di lapangan jadi semakin menyedihkan," ujarnya.

Menutup wawancara, Dirjen Abdul Kadir Jailani menyampaikan bahwa Indonesia selalu konsisten dalam mendukung perjuangan Palestina. Dukungan diberikan dengan mengikuti koridor aturan hukum internasional dan diplomasi. "Permintaan dari Palestina untuk menyuarakan isu perjuangan mereka dan upaya diplomasi di tingkat internasional sudah dan akan terus kita perjuangkan," tegasnya.

Diplomasi

No. 116 Tahun XIII
15 September 2021

MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI

# AKTIVIS KEMANUSIAN :
## INDONESIA BERPERAN AKTIF DAN KONSISTEN MENDUKUNG PALESTINA

**"Masyarakat Palestina mengucapkan salam terimakasih kepada rakyat Indonesia atas komitmen dukungan secara moril dan materiil bagi rakyat Palestina. Kalau Bangsa Indonesia bertetangga dengan Palestina, maka selesailah Penjajahan di Palestina."**

Palestina menjadi perhatian dunia, terlebih lagi konflik berkepanjangan dengan Israel seakan tidak berkesudahan. Indonesia memiliki peran penting dalam upaya membantu rakyat Palestina. Hal itu disampaikan aktivis kemanusiaan asal Indonesia yang tinggal di Palestina, Abdilah Onim atau biasa disapa Bang Onim. Berikut ini adalah petikan wawancara secara khusus yang dilakukan pasca serangan Mei 2021 di Palestina.

Serangan Israel ke Palestina pada Mei lalu sangat disesalkan banyak pihak karena menelan korban dengan kondisi memprihatinkan. Terlebih lagi, serangan agresi militer Israel yang dilancarkan di Jalur Gaza pada 11-21 Juni menewaskan 200 warga dari kalangan orang tua dan anak-anak. Meski informasi yang beredar dimenangkan oleh Palestina, namun kondisi yang terjadi sangat memprihatikan. Tidak hanya instalasi militer yang terkena sasaran bom saat penyerangan Israel. Tapi, fasilitas publik terkena sasaran bom dengan korbannya anak-anak, orang tua, dll. Kondisi tersebut sangat mengenaskan dengan listrik, saluran air mati. Akses di Palestina serba terbatas, terlebih 97 tahun di bawah otoritas Israel.

"Serangan Israel ke Palestina menjadikan porak poranda (kerusakan fasilitas). Usai agresi adalah masa *recovery* (masa pemulihan atau memperbaiki kerusakan fasilitas-red). Berbicara tentang peran Indonesia untuk Palestina, Kita sangat berterimakasih pada bangsa Indonesia serta pada Lembaga kemanusiaan yang telah banyak membantu. Masyarakat Palestina mengucapkan salam terimakasih kepada rakyat Indonesia atas komitmen dukungan secara moril dan materiil bagi rakyat Palestina. Kalau Bangsa Indonesia bertetangga dengan Palestina, maka selesailah Penjajahan di Palestina," terangnya.

Banyak yang menilai, salah satu permasalahan Palestina adalah dari persoalan internal yang belum selesai. Di Gaza ada 11 Faksi, selama ini yang dikenal adalah Fatah dan Hamas. Saya selalu menyampaikan kendala pejuang Palestina adalah masih terjadi konflik internal. Ini merupakan strategi Israel yang tidak rela kedua faksi bersatu. Bahkan, dalam hal politik tidak bertemu. Padahal, banyak yang berharap kedua faksi bertemu atau bersatu. Seperti rencana akan adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum, namun dibatalkan oleh Mahmud Abbas. Indonesia punya potensi menghadirkan Fatah dan Hamas untuk duduk bersama. Menyatukan dua potensi agar bisa bersatu untuk kemerdekaan Palestina. "Kita ingat bagaimana saat agresi militer Israel ke Palestinaa. Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menelpon secara langsung mengatakan, Bang Onim saya akan hadir di PBB untuk perundingan damai Palestina. Kondisi seperti ini patut dicontoh bagi para pejabat atau pemimpin di Palestina. Bagaimana, sosok perempuan yang berkomitmen berjuang untuk kemerdekaan Palestina di kancah dunia Internasional. Diplomasi yang dilakukan secara langsung bertemu dengan pemangku kebijakan. Yaitu: upaya penghentian aneksasi, penggusuran, pembangunan ilegal di tanah Palestina,"paparnya.

**Indonesia di Hati Palestina**

Rakyat Palestina sangat akrab dengan Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah Raja dermawan. Perannya yang strategis, yang kita bilang memompa dukungan perjuangan Palestina. Sebelumnya, Indonesia kurang dikenal warga Palestina. Namun, akhir-akhir ini Indonesia Satu Negara yang sangat aktif dan konsisten mendukung Palestina. Secara letak Indonesia jauh tapi dekat di hati rakyat Palestina. Yang terpenting adalah, jangan salah persepsi dengan Palestina. "Konflik Palestina itu bukan permasalahan Islam, agama, atau partai tertentu. Tapi, adalah bagaimana ini menjadi tanggungjawab bersama dalam mengangkat isu sesuai dengan fakta dan lingkungan. Permasalahan di Palestina adalah masalah kemanusiaan, ditambah dengan keterbatasan akses seperti listrik, air, dan lain-lain. Parahnya, atas kondisi tersebut tidak sedikit oknum yang memanfaatkannya untuk memperoleh kepentingan pribadi," jelasnya.

Dirinya mengingatkan agar tidak begitu saja menerima informasi yang beredar di medsos terkait Palestina. Kondisi diperparah dengan banyak beredar berita yang tidak sesuai fakta atau hoax di Indonesia. Untuk itu, dirinya meminta warga Indonesia untuk lebih bijak dalam menerima informasi terkait Palestina. Guna menyampaikan informasi dan berita berdasarkan fakta seputar Palestina, dirinya telah membuat kantor berita di Palestina. Salah satu tujuannya adalah menyampaikan berita sesuai fakta, berdasarkan data dan tidak berpihak. Selain itu, juga dirinya juga memiliki akun YouTube yang mengabarkan kondisi terkini sesuai fakta di lapangan. Jaringan internet di Palestina cukup bagus, sehingga memudahkan dalam meng-*upload* YouTube atau informasi lainya. "Dalam beberapa kesempatan kita juga dipercaya untuk menyalurkan bantuan bagi warga Palestina. Termasuk pendapatan dari YouTube juga turut saya donasikan. Meskipun, dalam penyaluran bantuan menghadapi tantangan seperti harus bertemu dengan beberapa kali chek points. Alhamdulillah, bantuan berupa makanan dan obat-obatan bisa sampai kepada warga Palestina,"tandasnya.

Dalam berbagai kesempatan, dirinya mengundang tokoh, pemimpin dan masyarakat Palestina untuk menghadiri upacara kemerdekaan Indonesia. Acara 17 Agustus yang digelar di Palestina juga bagian dari memperkenalkan tradisi dan budaya Indonesia. "Di hadapan para tokoh dan pemimpin Palestina saya selalu menyampaikan untuk bersatu. Bangsa Indonesia punya pengalaman yang sama dialami Palestina dalam menghadapi penjajah. Untuk itu, kalau ingin merdeka maka seluruh rakyat Palestina harus bersatu.[]

# INDONESIA TEGASKAN KEMBALI KOMITMEN DUKUNGAN KEPADA KEMERDEKAAN PALESTINA PADA DEBAT TERBUKA DEWAN KEAMANAN PBB

Pada Debat Terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB tentang situasi di Timur Tengah (28/10/2019) yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor, Indonesia menegaskan kembali dukungannya untuk kemerdekaan Palestina. Dubes Dian Triansyah Djani, Utusan Tetap RI untuk PBB tekankan "Israel harus segera menghentikan pembangunan ilegal dan provokasi oleh pasukan keamanan di tempat-tempat suci di wilayah pendudukan Palestina. Tindakan-tindakan ini telah melanggar hukum internasional dan resolusi PBB, seperti resolusi 2334 (2016) dan menghambat upaya pencapaian perdamaian dunia."

Indonesia percaya bahwa kemerdekaan Palestina sangatlah penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, komunitas internasional harus membalikkan tren negatif yang menghambat pencapaian *two-state vision* yang merupakan solusi terbaik dalam mengatasi konflik. "Kegagalan komunitas internasional dalam menyelesaikan masalah ini akan memberikan dampak besar, tidak hanya dalam pencapaian resolusi damai antara Israel-Palestina, namun juga perdamaian dan stabilitas di seluruh kawasan Timur Tengah." Tegas Dubes Djani.

Selanjutnya, karena konflik tanpa akhir ini juga telah mengakibatkan permasalahan kemanusiaan besar, Indonesia mengajak dunia internasional untuk mendukung upaya UNRWA dalam melindungi dan membantu rakyat Palestina. "Permasalahan keuangan yang dihadapi UNRWA saat ini telah menghambat kerja UNRWA untuk melaksanakan mandat penting dalam melindungi hak rakyat Palestina." Ujar Dubes Djani.

Indonesia juga sampaikan dukungan penuh terhadap rekonsiliasi dan persatuan Palestina, dan mendorong semua faksi-faksi pejuang Palestina untuk berkerja lebih keras dalam upaya mencapai rekonsiliasi.

Debat terbuka ini dihadiri oleh negara-negara bukan anggota DK PBB, terdapat sekitar 46 negara yang menyampaikan pernyataan nasionalnya, seperti Qatar, Vietnam, Mesir, dan negara-negara lain. Berbagai pernyataan pada debat menggambarkan keprihatinan komunitas internasional terhadap situasi yang memburuk di wilayah Palestina.

Untuk mencegah ancaman lebih lanjut pada perdamaian dan keamanan internasional, konsolidasi dukungan komunitas internasional dan anggota-anggota DK PBB diperlukan untuk mencapai penyelesaian yang efektif yang sejalan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip piagam PBB. (Sumber: Kemenlu).

Diplomasi

No. 116 Tahun XIII
15 September 2021

MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI

# APA KATA NU DAN MUHAMMADIYAH

## Ketua PBNU : Tragedi Kemanusian di Palestina Harus Diakhiri

**KH. Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj**
Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

> “Sejak Muktamar ke-13 NU di Menes, Banten tahun 1938, Nahdlatul Ulama (NU) telah menyatakan dukungan atas kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebagai sebuah bangsa yang merdeka.”

Dukungan NU terhadap Palestina tak pernah surut. Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siroj menegaskan sejak Muktamar ke-13 NU di Menes, Banten tahun 1938, Nahdlatul Ulama (NU) telah menyatakan dukungan atas kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebagai sebuah bangsa yang merdeka.

Kami juga mendorong seluruh pihak untuk melakukan dialog agar kekerasan tidak terjadi lagi dalam upaya penegakan kadaulatan Palestina.

Serangan brutal Israel terhadap rakyat Palestina merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan dan ditolerir. PBNU mendorong upaya gencatan senjata dari kedua belah pihak agar bantuan kemanusiaan bisa masuk dan kondisi Palestina pulih seperti sedia kala.

Selain itu, pihak PBNU mendesak kepada PBB dan Komunitas Internasional guna segara melakukan langkah cepat untuk menyepakati gencatan senjata.

PBNU juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggalang dukungan dan mengambil upaya penting dalam mewujudkan kedaulatan Palestina, sekaligus mengakhiri konflik kemanusiaan yang terjadi sehingga menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.[]

## Ketua PP Muhammadiyah : Mendukung Palestina Adalah Amanat Konstitusi

**Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si.**
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

> “Dalam catatan sejarah, Palestina juga merupakan salah satu negara paling awal yang memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Faktor-faktor inilah yang membuat dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah keniscayaan.”

Dukungan Indonesia terhadap Palestina setidaknya memiliki tiga landasan pokok: amanat Konstitusi, hutang sejarah dan solidaritas negara dunia ketiga.

Amanat Konstitusi termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”

Selain itu, tujuan nasional Indonesia juga termaktub dalam potongan kalimat pembukaan UUD 1945 aline keempat yang berbunyi, “melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dalam catatan sejarah, Palestina juga merupakan salah satu negara paling awal yang memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Faktor-faktor inilah yang membuat dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah keniscayaan.

Muhammadiyah harus adil membela setiap peristiwa yang menjadi korban dari agresi dan tindakan semena-mena, atas nama apapun,” tutupnya. (sumber : muhammadiyah.id)

**Oleh : Dian Novianti )***
Mahasiswi UNNES

# PERAN DIPLOMASI INDONESIA: DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

**Indonesia gencar menyuarakan kepentingan Palestina sejak dulu hingga saat ini. Konsisten dengan sikap itu, Indonesia menyuarakan penolakannya terhadap keputusan Presiden Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.**

Konflik Israel Palestina merupakan salah satu konflik Timur Tengah yang sampai saat ini menjadi sebuah konflik tak berujung dan belum menemukan titik temu. Zionisme yang dikampanyekan oleh Theodore Herzl menjadi sebuah embrio yang melahirkan sebuah negara Israel. Deklarasi negara Israel pada tahun 1948 merupakan sebuah tanda bergulirnya bola panas yang membuat orang-orang Arab tersadar. Klaim Yahudi atas tanah Palestina membuka sebuah lubang yang menganga dan siap menelan salah satu dari keduanya. Israel tidak pernah berhenti dengan upaya perluasan pemukiman Yahudi di tanah Palestina. Palestina sendiri menjadi pesakitan dan hanya mampu melawan sekuat tenaganya yang pada akhirnya tanah-tanah mereka dirampas untuk dijadikan pemukiman Yahudi.

Resistensi Israel selama ini bukan merupakan sesuatu yang aneh. Israel selalu mendapatkan restu dan dukungan dari negara 'polisi dunia' Amerika Serikat (AS). Seberapa besarpun tekanan dunia terhadap negara kecil ini, ia akan dengan leluasa mewujudkan keinginannya tanpa memikirkan kecaman-kecaman dari negara-negara di dunia yang tidak setuju dengan kebijakan dan sepak terjangnya. Seberapa banyakpun resolusi Dewan Keamanan PBB, ketika itu merugikan kepentingan Israel, Amerika akan menjadi negara terdepan yang mem-*veto* resolusi tersebut. Konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina menjadi konflik yang berkepanjangan. Di mana konflik ini melibatkan banyak hal termasuk melibatkan negara-negara di luar Israel dan Palestina. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah janji Indonesia sejak menggelar Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. Dari 29 negara yang hadir, hanya Palestina yang belum merdeka. Oleh karena itu, Indonesia gencar menyuarakan kepentingan Palestina sejak dulu hingga saat ini. Konsisten dengan sikap itu, Indonesia menyuarakan penolakannya terhadap keputusan Presiden Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang memperebutkan wilayah salah satunya adalah wilayah Jerusalem. Pelaksanaan politik luar negeri RI telah mencerminkan diplomasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa guna mencapai kepentingan nasional Indonesia sekaligus terus berperan aktif dalam upaya perwujudan perdamaian dan keamanan dunia, baik di tingkat bilateral, regional dan global. Di tingkat global, Indonesia juga terus mengambil prakarsa dan inisiatif di berbagai isu multilateral, antara lain : perlucutan senjata dan non-proliferasi, penanggulangan terorisme, penanggulangan kejahatan lintasnegara terorganisir, *Millennium Development Goals* (MDGs), ketahanan pangan dan energi, pandemi, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, perlindungan sumber daya hayati, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional, HAM, reformasi PBB, Gerakan Non-Blok (GNB), Organisasi Kerja sama Islam (OKI), Palestina, dan Kerja sama Selatan-Selatan.

Diplomasi Indonesia berhasil menggalang kekuatan negara-negara anggota OKI melawan kekuatan AS di PBB. Sebuah draf resolusi yang dirancang Mesir yang menolak pengakuan AS atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel berhasil dibawa ke Sidang DK PBB. Namun sayangnya draf resolusi itu gagal diadopsi karena *veto* AS, meskipun 14 negara anggota DK lainnya setuju. Hasil tersebut menunjukkan Indonesia bersama mayoritas negara di dunia mendukung perjuangan rakyat Palestina. Namun sayangnya keputusan di MU PBB tidak mengikat seperti di DK PBB. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana langkah selanjutnya yang bisa dilakukan Indonesia dan negara-negara OKI untuk memperjuangkan konsep *two states nation*. Sejarah mengatakan bahwa hubungan erat Indonesia dan Palestina sudah terjalin semenjak sebelum kemerdekaan. Hal ini ditandai oleh beberapa kaum muda yang belajar ke Timur Tengah dan bertemu dengan syaikh-syaikh dari Palestina, yaitu seperti Kahar Mudzakkir yang belajar ke Mesir dan bertemu dengan Sayyid Amin al Husaini. Syeikh inilah yang memberikan respon baik dengan memberikan ucapan selamat kepada bangsa Indonesia ketika ia mendengar kabar kemerdekaan Indonesia (Hakiem, 2017). Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap respon kebijakan luar negeri Amerika Serikat (Donald Trump) memberikan tanda bahwa Indonesia sangat konsisten terhadap isu-isu Palestina. Gejolak politik di Timur Tengah terutama konflik antara Palestina-Israel memberikan peluang bagi Indonesia tampil sebagai negara yang selalu mengusung konsep perdamaian dunia. Dalam kasus Palestina, keterbatasan kontrol terhadap wilayahnya tidak mengaburkan makna tetap atau berintegritas sebagaimana disyaratkan oleh kriteria *Defined Territory* karena hal itu terjadi akibat adanya pendudukan negara asing (Israel).

*)* Penulis adalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan artikel ini merupakan pemenang ke-3 lomba penulisan essai yang di selenggarakan oleh Direktorat Diplomasi Publik, Kemenlu RI.*

Diplomasi

No. 116 Tahun XIII
15 September 2021

MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI

# STAND FOR PALESTINE: ISU AGAMA ATAU KEMANUSIAAN?

Dukungan kepada Palestina ini bukan semata-mata didasarkan kepada isu agama. Namun, dukungan ini diberikan atas dasar isu kemusiaan yang mana telah menyengsarakan rakyat Palestina secara umum bukan hanya rakyat muslim Palestina.

**Oleh: Darmelia Puspita Sari**)*
Universitas Darussalam Gontor

Tepat pada tanggal 17 agustus 1945, Indonesia telah dinyatakan merdeka dari segala tindak penjajahan. Sistem politik luar negeri yang bebas-aktif juga telah membawa Negara ini kepada hubungan atau interaksi dengan negara-negaralainnya. Dengan politik yang seperti ini Indonesia tentunya dapat bebas dari pengaruh ataupun dorongan dari suatu negara, kelompok ataupun golongan tertentu yang beralaskan politik, dan juga aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia, yang mana tertulis jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini ialah dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, seperti hubungan bilateral Indonesia-Palestina yang hingga saat ini masih terjalin dengan baik. Palestina merupakan sebuah negara yang hingga saat ini masih berada dalam keadaan yang konfliktual. Konflik politik yang terjadi antara Israel dan Palestina ini, telah banyak menyita perhatian negara-negara lainnya. Indonesia misalnya, merupakan salah satu negara yang mendukung perjuaangan Palestina demi mendapatkan hak dan wilayah yang direbut oleh Israel.

Jika melihat kepada sejarah pengakuan Indonesia, Palestina termasuk salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, bersama dengan negara-negara liga arab lainnya. Dimana pengakuan dari negara lain seperti Palestina ini, merupakan salah satu syarat mutlak bagi suatu wilayah untuk menyatakan kemerdekaannya. Hubungan yang cukup baik antara Indonesia dengan Palestina telah mendorong Indonesia untuk melakukan langkah inisiatif guna berperan dalam membantu penanganan korban agresi dan proses pencapaian perdamaian antara Palestina dengan Israel. "Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel" (Presiden Soekarno, 1962)

Pertemuan demi pertemuan terus diupayakan oleh Indonesia untuk terus menyuarakan penghentian kekerasan dan agresi mileter demi menyelamatkan nyawa-nyawa yang tidak bersalah. Beberapa peran dan usaha yang dilakukan oleh Indonesia dapat dilihat dengan keikutsertaan Indonesia dalam forum Internasional diantaranya: keikuitsertaan Indonesia dalam komite Palestina (CEIRPP) termasuk menjadi wakil ketua biro, selain itu Indonesia juga aktif menyuarakan isu Israel dan Palestina ini dalam pertemuan PBB yang mendorong pengehentian kekerasan yang terjadi, serta penyuaraan keanggotaan penuh bagi Palestina dalam perserikatan bangsa-bangsa ini.

Jika kita lihat bersama, isu Palestina ini merupakan isu klasik yang telah muncul atau terjadi pada tahun 1948, dimana negara Israel diakui pertama kali oleh organisasi perserikatan bangsa-bangsa. Palestina merupakan Negara dengan tiga agama suci didalammnya. Meliputi Islam, Nasrani/Kristen, dan juga Yahudi. Keberadaan inilah yang sering kali masyarakat salah artikan dengan menyebut isu ini menrupakan isu agama.

Massa melakukan aksi damai untuk Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (10/12/2017). Aksi bela Palestina ini dilakukan untuk merespons keputusan Presiden AS Donald Trump dalam menetapkan Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

Isu Palestina yang sering kali dikatakan sebagai isu dengan faktor agama sebagai masalah pokok telah menjadikan konflik ini semakin memburuk.

Pecahnya konflik dikawasan ini sebenarnya bukan didasari oleh konflik agama yang seringkali dibicarakan, akan tetapi konflik ini muncul akibat dari usaha penggusuran, pengusiran, pendudukan, serta pembangunan pemukiman ilegal yang dilakukan oleh Israel yang tentunya mendapat respon oleh masyarakat Palestina secara umum terutama masyarakat Palestina yang berada di jalur Gaza. Tindak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Palestina ini, terjadi semata-mata akibat dari perampasan wilayah yang dilakukan oleh Israel bukan akibat konflik agama.

Isu Palestina atas dasar agama ini disebarluaskan hanya untuk menguntungkan pihak Israel dalam meraup keuntungan serta dukungan dari negara-negara yang memang notabennya tidak menyukai agama Islam, seperti salah satunya ialah Amerika Serikat dengan berbagai kebijakannya yang terus memberikan keuntungan bagi Israel agar dapat menduduki wilayah Gaza yang berada di tanah Palestina ini. Banyaknya korban yang bukan hanya umat muslim seharusnya dapat menjadi bukti nyata bagi masyarakat luas, bahwa konflik ini bukan semata-mata terjadi akibat konflik agama.

Perlu ditekankan sekali lagi bahwa isu ini merupakan isu kemanusiaan dan bukan isu agama. Munculnya faksi-faksi yang mendukung perjuangan Palestina ini,hanya sebagai Instrumen dari masyarakat Palestina dalam merespon perlawanan dari Israel. Dan kini setelah sekian lama, akhirnya usaha yang dilakukan oleh Indonesia terhadap konflik Palestina ini mulai menunjukkan titik terang. Pasalnya, beberapa minggu yang lalu genjatan senjata telah terjadi di Palestina. Gencatan senjata yang ditawarkan oleh Israel ini juga melibatkan Negara tetangga yaitu mesir yang mana akibatnya telah menjadikan wilayah Gaza menjadi kota lumpuh perekonomian, kesehatan dan keadaan lainnya.

Dengan adanya gencatan senjata yang telah terjadi ini, tidak serta merta berpengaruh terhadap penghentian bantuan-bantuan yang telah disalurkan sejak pecahnya konflik. Dukungan serta bantuan baik yang bersifat material ataupun non material harus terus di berikan kepada masyarakat Palestina yang berada di jalur gaza. Pertemuan-pertemuan dalam forum Internasional harus terus dilakukan untuk mengangkat isu Palestina, hingga Israel benar-benar menyerahkan hak dan wilayah gaza seutuhnya kepada rakyat Palestina.

Perlu diingat kembali, bahwa dukungan kepada Palestina ini bukan semata-mata didasarkan kepada isu agama. Namun, dukungan ini diberikan atas dasar isu kemusiaan yang mana telah menyengsarakan rakyat Palestina secara umum bukan hanya rakyat muslim Palestina.[]

)* : Penulis adalah Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, Sambirejo, Mantingan, Ngawi, JawaTimur, Indonesia. Artikel ini merupakan pemenang ke-2 lomba penulisan essai yang di selenggarakan oleh Direktorat Diplomasi Publik, Kemenlu RI.

# DEMI KEMANUSIAAN : KAMI, INDONESIA BERSAMA PALESTINA

Erviana Rizka Nauvanty)*

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa hubungan antara Palestina dan Israel sudah lama memanas dan tidak kunjung membaik. Konflik antara Palestina dan Israel telah berlangsung sejak awal tahun 1900-an. Berbagai upaya dilakukan baik oleh kedua negara maupun oleh dunia internasional untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun hingga saat ini belum ada titik temu. Secara singkat konflik tersebut terjadi karena Palestina dan Israel ingin mendirikan suatu negara di atas tanah atau wilayah yang sama. Konflik berlangsung secara berkepanjangan dan menggunakan cara kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina telah membawa berbagai dampak kerugian baik materiil maupun immaterial. Baru-baru ini,di tengah keadaan dunia yang sedang mengahadapi pandemi COVID-19, Israel kembali meluncurkan serangan ke Palestina tepatnya pada tanggal 17 Mei 2021, pesawat tempur Israel melancarkan sebanyak 80 serangan udara di beberapa daerah di Kota Gaza. Secara keseluruhan korban tewas di Gaza berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina sebanyak 188 oramg, termasuk 55 anak-anak dan 33 wanita dengan jumlah warga terluka sebanyak 1.230 orang.

Oleh sebab itulah, tindakan yang dilakukan oleh Israel sudah termasuk ke dalam kategori kejahatan perang. Sumber utama dari hukum humaniter terdiri dari Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Statuta Roma 1998 bahwa kejahatan perang berarti Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949. Kejahatan Perang yang telah dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina diantaranya:

- Militer Israel secara sadar melakukan pembunuhan terhadap warga Palestina, baik itu militer maupun penduduk sipil;
- Militer Israel melakukan penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi sehingga menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau kesehatan kepada warga Palestina;
- Militer Israel Secara sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu, objek yang bukan merupakan sasaran militer, dengan cara melakukan serangan udara dengan pengeboman rumah-rumah ataupun gedung milik warga sipil Palestina yang bukan objek militer;
- Militer Israel secara sengaja melakukan serangan terhadap masjid Al-Aqsa ketika warga Palestina sedang melakukan ibadah. Bahwa penyerangan gedung-gedung yang digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, termasuk kejahatan perang;
- Perusakan wilayah secara meluas dilakukan untuk melakukan pengusiran terhadap warga Palestina yang tinggal di sekitar wilayah konflik.

Perang sejatinya bukanlah jalan untuk menyelesaikan suatu konflik, sehingga perlu dihindari oleh negara-negara yang berkonflik. Dalam Pasal 2 ayat (4) Prinsip PBB menyatakan bahwa "seandainya perang harus ditempuh maka para pihak harus melaksanakan sesuai dengan hukum humaniter". Fungsi utama adanya hukum humaniter internasional adalah untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia bagi para pihak yang bersengketa agar tidak menimbulkan korban dan akibat yang buruk bagi kehidupan manusia. Namun, pada kenyataannya tindakan yang telah dilakukan oleh Israel terhadap Palestina telah melanggar hukum humaniter internasional, oleh karena pelanggaran yang dilakukan Israel perlu diadakannya upaya mengadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Indonesia sudah sejak lama menyatakan bahwa akan memberikan dukungan terhadap Palestina untuk mendapatkan haknya dan mengecam secara tegas atas tindakan yang dilakukan oleh Israel. Menurut historisnya, Palestina dan negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Mesir menjadi negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya karena latar belakang hubungan Indonesia-Palestina yang terjalin baik, tetapi juga pemberian dukungan ini sebagai langkah Indonesia dalam menegakkan misi kemanusiaan dan perdamaian. Jadi, dapat diketahui dukungan yang diberikan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya karena faktor agama, tetapi jauh lebih luas dari itu. Sikap tersebut diambil sebagai implementasi amanat konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas tercantum dalam pembukaan bahwa "kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa" dengan menentang segala bentuk penjajahan di dunia yang tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian pada alinea IV menyebutkan bahwa Indonesia "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sikap tersebut mengimplementasikan bahwa Indonesia menyadari betul menjadi bagian dari dunia internasional sudah seharusnya turut serta menjaga ketertiban dan perdamaian di dunia. Selain itu, sebagai bagian dari negara anggota PBB, yang telah meratifikasi HAM Internasional dan juga Statuta Roma 1998 maka otomatis pemerintah Indonesia mengemban tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang telah tertuang dalam peraturan tersebut. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang menjadi garda terdepan dalam memberikan dukungan sepenuhnya kepada Palestina dalam menghadapi konflik dengan Israel. Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan dukungan nyata kepada Palestina yaitu melalui jalur diplomasi. Karena menyelesaiakan konflik dengan peperangan pada dasarnya hanya akan menimbulkan masalah baru yang berkepanjangan, seperti halnya yang terjadi antara Israel dan Palestina. Oleh sebab itu, lebih baik menggunakan jalur perdamaian seperti diplomasi. Indonesia dapat menjalin diplomasi dengan organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk secara khusus meminta PBB memerintahkan gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Selanjutnya diplomasi dapat dilaksanakan melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dengan negara-negara yang menjadi anggota OKI, secara khusus membahas konflik yang tengah dialami Palestina, melalui organisasi Gerakan Non Blok (GNB). Atau dapat juga melaksanakan diplomasi dengan negara-negara yang memiliki pengaruh besar seperti Amerika Serikat dan negara UniEropa untuk mengadakan perundingan dengan Israel dan menyudahi konflik bersenjata. Indonesia dapat juga menawarkan diri menjadi negara yang menjembatani perundingan perdamaian antara Palestina dan Israel agar tidak ada lagi konflik berkepanjangan. Kemudian pemerintah Indonesia perlu memberikan bantuan dana kepada Palestina untuk digunakan pemulihan kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat konflik, seperti pembangunan rumah sakit, gedung pendidikan, sarana dan prasarana lainnya yang sebelumnya telah hancur lebur akibat serangan udara oleh Israel.

Dalam forum internasional, Indonesia selalu berkomitmen untuk meminta kepada dewan PBB melakukan investigasi menyeluruh atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Israel. Meskipun Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998, bukan berarti tidak dapat diadili melalui hukum pidana internasional, justru upaya tersebut harus dilaksanakan karena kejahatan perang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membawa akibat meluas bukan hanya bagi Palestina tetapi masyarakat dunia. Konflik antara Israel dan Palestina tidak akan menemukan jalan keluar apabila dilakukan dengan jalur perang dengan kekerasan, oleh karena itu perlu ditempuh dengan jalur perdamaian. Dukungan pemerintah Indonesia yang diberikan kepada Palestina tidak hanya sebagai bentuk empati semata, tetapi juga atas dasar kemanusiaan, perdamaian dan keadilan yang harus ditegakkan dan dijunjung tinggi sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi. Dukungan pemerintah Indonesia kepada Palestina bukan hanya menjadi tangung jawab Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional melainkan juga sebagai tanggung jawab moril bangsa Indonesia terhadap tujuan bangsanya sendiri.

)* Penulis adalah Mahasiswi UNNES. Artikel ini menjadi juara 1 lomba Essai yang diselenggarakan oleh Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI

Diplomasi

No. 116 Tahun XIII
15 September 2021

MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI

# TITIK KRITIS DAN DETIK-DETIK MENEGANGKAN EVAKUASI WNI DI KABUL

Tim kesehatan bergegas menaiki pesawat setelah mendarat di Bandara Halimperdanakusuma, Jakarta. (Kementerian Luar Negeri).

Proses evakuasi WNI dari Afghanistan merupakan pengalaman sangat berharga. Bahkan, Menlu RI Retno P Marsudi, sebagaimana dituturkan Direktur PWNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha, menyatakan proses evakuasi WNI di Kabul merupakan proses paling kompleks dan rumit. Kompleksitas tersebut disebabkan oleh kerawanan keamanan, dimana situasi Kabul sangat tidak menentu..

Terlebih, ancaman COVID-19 yang membuat proses evakuasi ini berbeda dengan evakuasi-evakuasi lainnya. Dari sisi ancaman keamanan, lokasinya terlihat. Namun, ancaman COVID-19 tidak terlihat, sehingga membentuk kondisi yang kompleks.. Meski demikian, khusus ancaman COVID-19, tim evakuasi sudah meminta seluruh *evacuee* melakukan tes PCR yang dilakukan di KBRI Kabul sebelum keberangkatan.

Kerumitan lainnya adalah ikhtiar membangun komunikasi dengan berbagai pihak, menyiapkan rapat perencanaan evakuasi yang berulang kali, dan tuntutan menyiapkan skenario rencana yang berubah secara cepat. Sebab, situasi berubah sangat cepat setelah tanggal 15 Agustus 2021. Padahal, sebelum terjadinya deklarasi penguasaan Kabul oleh Taliban, Indonesia sudah membahas rencana kontijensi sejak dua bulan sebelumnya. Salah satunya adalah evakuasi.

Kompleksitas yang terjadi tidak hanya dialami oleh tim evakuasi yang berangkat ke Kabul, namun dialami pula oleh Tim Darat di Indonesia yang tidak kalah sibuk, mulai dari menyiapkan berbagai macam logistik untuk tim, termasuk proses karantinanya, dan sebagainya.

**Dua Titik Kritis**

Selain itu, ada dua titik kritis yang dihadapi selama di Kabul. **Pertama**, pergerakan rombongan KBRI Kabul menuju bandara. Di situ mereka harus melewati banyak *check point* dan melewati ribuan orang yang sudah berkumpul di sekitar bandara untuk masuk. Ribuan orang berkerumun menutup jalan dan akses masuk ke bandara, selain itu perlu adanya koordinasi dengan NATO.. Di saat-saat seperti itu, *landing permission* baru diterbitkan sekitar empat jam sebelum pesawat landing.

**Titik kritis kedua,** keamanan penerbangan. Saat itu, situasi di bandara kurang kondusif akibat banyaknya orang berkumpul dan fasilitas bandara yang minim. Judha Nugraha selaku salah satu orang yang tergabung dalam tim evakuasi ini menggambarkan bahwa pilot yang terhubung dengan *air traffic control* (ATC) Bandara Kabul, diwanti-wanti ATC terkait risiko keamanan di bandara yang menjadi tanggung jawab masing-masing tim penerbangan. ATC menyampaikan ke pilot: *clear to land at your own risk.* Ini menggambarkan situasi keamanan Bandara Kabul sangat *fluid*. Ancaman keamanannya bisa muncul setiap saat. ATC juga meminta agar pilot tidak mematikan mesin, yang mana kondisi ini sudah diantisipasi sejak awal oleh tim evakuasi. Sehingga, ketika ada kerawanan, pesawat bisa segera *take off* secepat mungkin.

Dua hal kritis inilah yang menjadi tantangan tim evakuasi untuk dapat dikelola sebaik mungkin. Selain itu, isu keamanan penerbangan dan *landing permit*-nya tersebut membutuhkan koordinasi dan diplomasi yang sangat ekstensif. Bukan saja di level teknis, namun di level Menlu RI langsung. Menlu Retno P. Marsudi bahkan menghubungi beberapa *counterpart*-nya untuk bisa mendapatkan *landing permit*.

**Problem *Landing Permit***

Menurut Judha, sebenarnya *landing permit* sudah diberikan di awal, yakni tanggal 19 Agustus 2021 pukul 04.00 dinihari waktu Kabul. Namun karena ada kericuhan di bandara, maka *landing permit i*ni dibatalkan, di-*hold* sampai batas waktu yang tidak jelas. Masalahnya, tidak ada info lebih lanjut kapan *landing permit* dapat diberikan kembali.

Sebagaimana disampaikan Judha, tim evakuasi telah melakukan kalkulasi tentang urgensi untuk bisa masuk Kabul secepat-cepatnya, karena jika semakin lama mendekati *game changer* tanggal 31 Agustus 2021 (batas resmi terakhir ditariknya pasukan AS dari Afghanistan), situasi mungkin akan semakin tidak menentu. Karena itu, upaya diplomasi yang dilakukan Menlu RI dan pihak terkait lainnya, seperti KBRI Washington DC (hubungannya dengan Amerika Serikat), KBRI Ankara (hubungannya dengan Turki, mengingat pengawalan bandara dilakukan oleh NATO yang juga terkait Turki, serta koordinasi antar keduanya masih *fluid*), dan KBRI Brussel (markas NATO ada di Brussel).

Tim evakuasi juga melakukan komunikasi langsung dengan Kedutaan AS di Jakarta. Semua negara sahabat dan jalur-jalur yang memungkinkan untuk dapat membantu dirilisnya *landing permit* bagi pesawat militer Indonesia yang membawa rombongan tim evakuasi.

Setelah berbagai macam upaya diplomasi tersebut, akhirnya *landing permit* muncul jam 12 waktu Islamabad, atau jam 11.30 waktu Kabul. Padahal *take off* dijadwalkan pukul 04.00 dinihari. Untungnya semua anggota tim evakuasi sudah *standby*, sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu *landing permit* muncul di menit-menit terakhir, tim sudah siap. Dan ternyata memang muncul *last minutes.*

Segera setelah muncul, dua tim bergerak. Pertama, tim evakuasi, segera *take off dari* Islamabad menuju Kabul. Kedua, tim KBRI, bergerak dari KBRI menuju bandara. Ini gambaran betapa kompleks dan tidak menentunya situasi.

**Detik-Detik Menegangkan**

Pada saat *landing permit* didapatkan pukul 12.00 waktu Kabul, lima menit setelah itu, yakni pukul 12.15, rombongan KBRI mulai bergerak ke bandara. Perjalanan normal Kantor KBRI menuju Bandara Kabul biasanya ditempuh tidak lebih dari 30 menit. Namun yang terjadi, waktu yang dibutuhkan selama perjalanan tersebut ternyata molor hingga enam jam. Itu membuat semua tim evakuasi yang *standby* di bandara menahan nafas, tegang, dan cemas. Semua anggota mulai berpikiran macam-macam, dan menduga-duga apa yang sedang terjadi dalam perjalanan rombongan KBRI menuju bandara.

Ketegangan tim muncul karena dalam rancangan awal, pesawat hanya akan ada di Bandara Kabul selama 30 menit. Mesinnya tetap nyala, sebab jika mesin dimatikan, untuk start lagi butuh waktu lama, dan jika ada kerawanan, responnya akan terlambat. Pesawat yang direncanakan hanya selama 30 menit, akhirnya molor dua jam. Selama

dua jam tersebut, mesin pesawat nyala terus-menerus, dengan risiko kehabisan bahan bakar untuk bisa kembali ke Islamabad, Pakistan, sebagai transit aman pertama.

Alhamdulillah. Akhirnya sekitar dua jam menunggu di bandara, rombongan tim dari KBRI tiba, kemudian sesegera mungkin *boarding*, dan pesawat segera kembali ke Islamabad. Dalam proses yang serba cepat tersebut, semua orang yang dievakuasi tidak bisa bawa banyak barang, karena barang bawaan yang berat akan membuat pesawat terlalu berat dan berisiko tinggi.

Selama menanti perjalanan rombongan dari KBRI menuju bandara, situasi saat itu sama sekali tidak ada jaminan keamanan di bandara. ATC sendiri sudah sangat tegas mengatakan *clear to land at your own risk*. Ini menegaskan ketiadaan jaminan keamanan dan kerawanan yang cukup tinggi. NATO selaku penanggungjawab Bandara Kabul pun tidak pernah memberi jaminan keamanan untuk pesawat militer Indonesia. Namun, Indonesia diberi kesempatan untuk *parking* di wilayah apron bandara.

Situasi di bandara pada saat itu memang dipenuhi aneka pesawat evakuasi lain, terutama pesawat dari negara-negara NATO. Judha menuturkan, pada saat landing, yang hilir mudik di sana hanya pesawat-pesawat militer NATO. Tidak ada satupun pesawat sipil. Jadi saat itu negara-negara NATO juga aktif melakukan evakuasi. Bukan saja warga negara Amerika, tapi juga warga negara Afghanistan yang pernah bekerja untuk Amerika.

Pada akhirnya, dengan aneka ancaman yang ada, potensi kerawanan, serta ketegangan yang dialami seluruh anggota tim evakuasi, proses evakuasi berjalan baik, dan berhasil mengeluarkan total 33 orang dari Kabul.[]

# EVAKUASI WNI DI AFGHANISTAN
## PERUBAHAN RENCANA DAN KERAWANAN ANCAMAN

Pasca jatuhnya Afghanistan ke tangan Taliban, proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari negeri para mullah ini sangat tidak mudah. Banyak risiko dan tantangan yang harus dihadapi.

Menurut Ulif Taftanzani, staf Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI, jauh sebelum evakuasi, sebenarnya situasi di Afghanistan secara intensif terus dimonitor sejak Juni 2021. PWNI melakukan kontak dan komunikasi intens dengan KBRI Kabul terkait perkembangan dan kondisi Afghanistan menjelang rencana ditariknya pasukan Amerika Serikat secara resmi pada 31 Agustus 2021.

Ulif menyampaikan bahwa persiapan evakuasi baru dimulai sekitar tanggal 9 Agustus 2021, minggu kedua Agustus, ketika melihat semakin buruknya situasi di Afghanistan dengan pergerakan Taliban yang makin menguasai banyak wilayah negara tersebut. Setelah melakukan konsultasi beberapa kali dengan KBRI Kabul dan juga dengan jajaran pimpinan di Kemlu RI, PWNI memutuskan mulai menjajaki evakuasi. Persiapan dan rapat koordinasi baik internal maupun eksternal, dilakukan dengan melibatkan beberapa kementerian terkait lainnya.

Evakuasi ini melibatkan unsur TNI, Puskes TNI, BIN, BAIS, serta medis. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan keputusan membentuk sebuah tim, dan mulai menyiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan evakuasi. Secara teknis, rapat-rapat yang digelar sejak 10 Agustus 2021, baru terbentuk tim tanggal 13-14 Agustus 2021.

**Rencana Mendadak Berubah**

Di bawah koordinasi PWNI, diadakanlah konsinyering perencanaan evakuasi. Awalnya evakuasi direncanakan tanggal 15 Agustus 2021. Namun, ada perubahan eskalasi signifikan yang tidak terduga di Kabul, yakni tanggal 14 Agustus 2021, dimana Taliban berhasil menguasai Kabul., dan pada saat yang sama pemerintahan Afghanistan juga kolaps karena Presiden Afghanistan Asraf Ghani melarikan diri ke luar negeri.

Pada saat yang sama, terjadi *chaos* di bandara Kabul. Evakuasi yang awalnya direncanakan menggunakan pesawat sipil, akhirnya harus berubah dengan menggunakan pesawat militer karena rusuhnya bandara di Kabul. NATO sebagai pihak yang mengelola bandara dan keamanannya, menyatakan Bandara Kabul sebagai *No Flight Zone*. Tidak diizinkan penerbangan sipil. Mau ti-

Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia

# TABLOID Diplomasi

www. Kemlu.go.id tabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemlu

NO. 116
TAHUN XIII
TGL. 15 SEPTEMBER 2021

**Direktorat Diplomasi Publik**
Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110
Telepon : 021-3813480
Faksimili : 021-3858035

MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI

dak mau, opsi penerbangan militer adalah pilihan paling mungkin. Saat itu, Bandara Kabul memang hanya mengizinkan pendaratan penerbangan militer.

Menurut Ulif, banyak hal berubah dari persiapan yang telah direncanakan sejak jauh hari. Tanggal 16 Agustus 2021, Menlu Retno Marsudi menghubungi Panglima TNI untuk meminta bantuan penyediaan pesawat. Tanggal 17 Agustus 2021, rencana evakuasi dikongkritkan dengan rapat Bersama TNI AU dan skuadronnya. Hasil rapat memutuskan tim akan berangkat pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi dengan penuh spekulasi. Keputusan ini sebuah pilihan berani di tengah-tengah banyak ketidakpastian, karena pengurusan perizinan penerbangan tidak hanya di Kabul saja, tapi juga di negara-negara yang dilewati pun membutuhkan *clearance*.

Total tim evakuasi yang berangkat bersama kru pesawat ada 31 orang. Kru pesawat 13 orang, dan tim evakuasi 18 orang, ditambah unsur keamanan dari Detasemen Khusus Anti Teror. Penambahan Korps Khusus TNI mengingat ancaman keamanan di Kabul. Jadi, dari 18 orang tim evakuasi, ada 8 personil keamanan dengan persenjataan lengkap

**.Dua Ancaman Utama**

Menurut Ulif, ada dua ancaman utama dalam proses evakuasi ini. Yakni ancaman keamanan dan COVID. Karena itu, skenario evakuasi dibuat dengan tujuan untuk sama-sama dapat menangani dua ancaman tersebut.

Di awal, kapasitas pesawat yang sedikit menjadi kesulitan tersendiri. Karena itu, *setting arrangement* dalam pesawat beserta protokol kesehatannya diatur sedemikian rupa. Dengan berbagai macam pemberitaan saat itu, tim evakuasi yang turun ke darat diminimalisir agar proses boarding pesawat bisa cepat. Ketika itu, diskenariokan proses *boarding* barang dan penumpang hanya 30 menit selesai. Namun pada kenyataannya berlangsung lebih lama, yakni kurang lebih dua jam karena rombongan yang hendak dievakuasi belum tiba dari bandara.

**Rencana Jalur Darat**

Salah satu kontijensi evakuasi adalah rencana perjalanan melalui jalur darat. Sayangnya, tantangannya sangat tidak mudah, karena aspek pengamanan tidak bisa lagi mengandalkan pengamanan dari pemerintah Afghanistan. Dengan demikian, jalur darat berisiko sangat tinggi, sehingga ini menjadi opsi terakhir dan pilihan terbaik tetap jalur udara.

Dalam proses evakuasi WNI di Afghanistan, dilakukan pula pendekatan dengan Taliban untuk memberi pengamanan kepada rombongan evakuasi dari KBRI. Perjalanan WNI dari KBRI menuju bandara diupayakan mendapatkan pengamanan dari Taliban, yang dilakukan secara paralel dari level teknis sampai level pimpinan Taliban.

Ulif menuturkan bahwa seminggu sebelum evakuasi, Dirjen ASPASAF sempat melakukan *video conference* dengan pemimpin Taliban di Doha, Qatar, untuk meminta jaminan keamanan ini. Kemudian di level teknis, pejabat kita di KBRI Kabul juga melakukan pendekatan dengan Taliban. Secara umum, setelah mengumumkan berkuasa, Taliban menyatakan menjamin misi evakuasi terhadap perwakilan asing di sana. Dalam konteks evakuasi ini, sebenarnya Taliban berharap perwakilan Indonesia tetap di sana, karena dengan keberadaan perwakilan asing berarti mengokohkan keberadaan Taliban sebagai penguasa baru. Meski demikian, Taliban pun tidak keberatan saat Indonesia memutuskan melakukan evakuasi. Taliban memberi pengamanan untuk rombongan KBRI ke bandara.

**Titik Rawan Fakta Lapangan**

Faktanya, di lapangan tidak semulus itu. Meski sudah dikawal Taliban, perjalanan yang biasanya sekitar 20 menit dari KBRI ke bandara, akhirnya menjadi lebih lama. Butuh berjam-jam mencapai bandara karena adanya beragam *check point* dan pemeriksaan oleh prajurit Taliban di sepanjang jalan menuju bandara.

Dalam evakuasi ini, jumlah WNI, termasuk staf KBRI ada 26 orang. Lalu, ada 7 warga negara asing: lima orang Filipina dan dua warga negara Afghanistan ikut dalam rombongan. Jadi, total yang dievakuasi sebanyak 33 orang. WNA dari Filipina ada dalam rombongan karena ada permintaan langsung dari pemerintah Filipina.

Menurut Ulif, sebenarnya ada permintaan dari Singapura, namun posisi warga negara Singapura tidak memungkinkan untuk evakuasi. Tim evakuasi sendiri tidak bisa menjemput mereka, dan mereka juga tidak bisa mencapai bandara, sehingga tidak mungkin ikut diangkut.[]